

# PROFIL TEMPAT TINGGAL JAWA TENGAH 2015



# PROFIL TEMPAT TINGGAL JAWA TENGAH 2015



# PROFIL TEMPAT TINGGAL

## JAWA TENGAH 2015

ISSN : 2407-3431  
No. Publikasi : 33520.1611  
Katalog BPS : 3303003.33  
Ukuran Buku : 17,5 cm x 25 cm  
Jumlah Halaman : xii + 54 halaman

**Naskah :**

Bidang Statistik Sosial

**Gambar Kulit :**

Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik

**Diterbitkan oleh :**

©Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah

**Dicetak oleh :**

CV. Pelita

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

## KATA PENGANTAR

Publikasi Profil Tempat Tinggal Jawa Tengah Tahun 2015 merupakan salah satu topik penyajian hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2015 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. Data yang disajikan mencakup kondisi dan fasilitas tempat tinggal di Jawa Tengah tahun 2015.

Publikasi ini menggambarkan kondisi tempat tinggal penduduk sampai wilayah kabupaten/kota sehingga dapat melihat perbandingan kondisi tempat tinggal antar wilayah di Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu indikator untuk melihat kesejahteraan penduduk. Dalam publikasi ini disajikan pula penjelasan mengenai lingkup data dan istilah teknis yang digunakan, sehingga pengguna data dapat lebih memahami informasi yang disajikan.

Kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan sehingga publikasi ini dapat disajikan, disampaikan ucapan terima kasih. Semoga publikasi ini bermanfaat.

Semarang, Agustus 2016  
Kepala Badan Pusat Statistik  
Provinsi Jawa Tengah



<sup>4/</sup> DR. Margo Yuwono, M.Si

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	2
1.3 Ruang Lingkup	2
1.4 Sistematika Penyajian	2
BAB II METODOLOGI	5
2.1 Sumber Data	5
2.2 Metode Pengumpulan Data	5
2.3 Konsep dan Definisi	5
BAB III POTRET KONDISI TEMPAT TINGGAL	13
3.1 Status Penguasaan Tempat Tinggal	13
3.2 Kualitas Bangunan Tempat Tinggal	15
3.2.1 Atap Terluas Bangunan Tempat Tinggal	15
3.2.2 Jenis Dinding Bangunan Tempat Tinggal Terluas	17
3.2.3 Jenis Lantai Terluas	19
3.3 Luas Lantai	21
BAB IV KELENGKAPAN FASILITAS PERUMAHAN	23
4.1 Sumber Penerangan	23
4.2 Air Minum	25
4.3 Fasilitas Buang Air Besar	29

Bab V	Penutup	35
5.1	Kesimpulan	35
5.2	Saran dan Rekomendasi	35
DAFTAR PUSTAKA		37
LAMPIRAN		39

<http://jateng.bps.go.id>

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Persentase Rumah Tangga menurut Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal yang Ditempati dan Tipe Daerah, 2015	14
Tabel 2. Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Atap Terluas Bangunan Tempat Tinggal dan Tipe Daerah, 2015	17
Tabel 3. Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Dinding Terluas Bangunan Tempat Tinggal dan Tipe Daerah, 2015	18
Tabel 4. Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Lantai Terluas Bangunan Tempat Tinggal dan Tipe Daerah, 2015	20
Tabel 5. Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Penerangan Bangunan Tempat Tinggal Tahun 2013 - 2015	24
Tabel 6. Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Penerangan Bangunan Tempat Tinggal dan Tipe Daerah, 2015	24
Tabel 7. Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Air Minum dan Tipe Daerah, 2015	27
Tabel 8. Persentase Rumah Tangga menurut Cara memperoleh Air Minum dan Tipe Daerah, 2015	28
Tabel 9. Persentase Rumah Tangga menurut Penggunaan Fasilitas Buang Air Besar dan Tipe Daerah, 2015	29

Tabel 10.	Persentase Rumah Tangga menurut Tempat Pembuangan Akhir Tinja dan Tipe Daerah, 2015	32
Tabel 11.	Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Kloset dan Tipe Daerah, 2015	33
Tabel A.1.	Banyaknya Rumah Tangga menurut Kabupaten/Kota, 2013 - 2015	41
Tabel A.2.	Persentase Rumah Tangga menurut Kabupaten/Kota dan Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal, 2015	42
Tabel A.3.	Persentase Rumah Tangga menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Atap Terluas Bangunan Tempat Tinggal, 2015	43
Tabel A.4.	Persentase Rumah Tangga menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Dinding Terluas Bangunan Tempat Tinggal, 2015	44
Tabel A.5.	Persentase Rumah Tangga menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Lantai Terluas Bangunan Tempat Tinggal, 2015	45
Tabel A.6.	Persentase Rumah Tangga menurut Kabupaten/Kota dan Luas Lantai Per Kapita Bangunan Tempat Tinggal, 2015	46
Tabel A.7.	Persentase Rumah Tangga menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Penerangan Utama Bangunan Tempat Tinggal, 2015	47
Tabel A.8.	Persentase Rumah Tangga menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Air Minum, 2015	48



Tabel A.9.	Persentase Rumah Tangga menurut Kabupaten/Kota dan Jarak Sumber Air ke Tempat Penampungan Kotoran/Tinja, 2015	50
Tabel A.10.	Persentase Rumah Tangga menurut Kabupaten/Kota dan Cara Memperoleh Air Minum, 2015	51
Tabel A.11.	Persentase Rumah Tangga menurut Kabupaten/Kota dan Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar, 2015	52
Tabel A.12.	Persentase Rumah Tangga menurut Kabupaten/Kota dan Tempat Pembuangan Akhir Tinja, 2015	53
Tabel A.13.	Persentase Rumah Tangga menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kloset, 2015	54



## DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 1.	Persentase Rumah Tangga menurut Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal, 2015	13
Gambar 2.	Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Atap Terluas Bangunan Tempat Tinggal, 2015	16
Gambar 3.	Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Dinding Terluas Bangunan Tempat Tinggal, 2015	18
Gambar 4.	Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Lantai Terluas Bangunan Tempat Tinggal, 2015	19
Gambar 5.	Persentase Rumah Tangga menurut Luas Lantai Per Kapita, 2015	22
Gambar 6.	Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Air Minum, 2015	26
Gambar 7.	Persentase Rumah Tangga menurut Jarak Sumber Air Minum ke Tempat Penampungan Limbah/Kotoran/Tinja Terdekat, 2015	28
Gambar 8.	Persentase Rumah Tangga menurut Tempat Pembuangan Akhir Tinja, 2015	31
Gambar 9.	Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Kloset, 2015	33

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Tempat tinggal merupakan salah satu kebutuhan yang sangat mendasar bagi kehidupan seseorang atau rumah tangga, selain pangan dan sandang. Rumah menjadi kebutuhan dasar terkait dengan peran penting yang dimilikinya, seperti dapat melindungi dari gangguan luar dan penularan penyakit. Selain itu fungsi rumah yang tak kalah penting adalah sebagai tempat untuk tumbuh dan berkembang. Mengingat rumah merupakan salah satu kebutuhan primer, maka negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam kawasan perumahan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman disebutkan dalam Pasal 1 Ayat 7 bahwa rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemilikinya. Kondisi perumahan (karakteristik perumahan) dapat menjadi ukuran kesejahteraan suatu rumah tangga. Beberapa penelitian mengenai kemiskinan dan beberapa program penanggulangan kemiskinan telah memasukkan beberapa karakteristik perumahan sebagai pendekatan indikator, misalnya dalam program Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada tahun 2005. Penentuan rumah tangga penerima BLT didasarkan pada pendekatan karakteristik rumah tangga, yang dikenal dengan 14 variabel penentu rumah tangga penerima BLT, yang diantaranya adalah karakteristik perumahan seperti luas lantai rumah, jenis lantai rumah, jenis dinding, fasilitas tempat buang air besar, sumber air minum, serta sumber penerangan.

Gambaran kondisi rumah juga dapat menjadi cerminan kondisi kesehatan penghuninya. Selain itu kondisi rumah juga dapat menjadi cerminan keberhasilan pembangunan perumahan serta memberi gambaran perkembangan pembangunan perumahan di suatu wilayah. Ketersediaan data statistik perumahan diharapkan dapat membantu para pemangku kepentingan di bidang pembangunan perumahan dalam membuat kebijakan mengenai perumahan dan permukiman yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Data makro mengenai perumahan dalam publikasi ini bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2015. Susenas secara rutin mengumpulkan data karakteristik perumahan dalam kelompok data pokok (KOR) dan kelompok data sasaran (Modul). Pengumpulan data perumahan rinci dalam kelompok modul dilakukan sejak tahun 1986, seterusnya data modul ini dikumpulkan setiap tiga tahun. Selain itu untuk keperluan perencanaan pembangunan jangka pendek, beberapa variabel perumahan, sejak tahun 1992 juga dipantau setiap tahun melalui Susenas dalam kelompok data pokok (KOR).

## **1.2 Tujuan**

Penulisan publikasi ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai kondisi perumahan di Provinsi Jawa Tengah serta kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah, yang diharapkan dapat digunakan sebagai bahan perencanaan untuk pemerintah daerah khususnya pemangku kepentingan di bidang pembangunan perumahan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan perumahan serta bahan perencanaan bagi pihak non pemerintah, seperti pihak swasta pengembang perumahan.

## **1.3 Ruang Lingkup**

Ruang lingkup analisa mencakup berbagai karakteristik perumahan yang meliputi status penguasaan rumah tempat tinggal, kualitas, dan fasilitas rumah tinggal di Provinsi Jawa Tengah.

## **1.4 Sistematika Penyajian**

Untuk memperoleh gambaran rinci serta mempermudah pembahasan, maka penulisan publikasi ini disajikan dalam 5 (lima) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **Bab I Pendahuluan**

Menguraikan latar belakang, tujuan penulisan, ruang lingkup, dan sistematika penyajian publikasi.

### **Bab II Metodologi**

Menguraikan tentang sumber data yang digunakan, metode pengumpulan data, serta kosep dan definisi yang digunakan.

### **Bab III Potret Kondisi Tempat Tinggal**

Pada bab ini akan diuraikan mengenai kondisi tempat tinggal yang ada di Jawa Tengah, dilihat dari status kepemilikan bangunan, dan kondisi fisik

tempat tinggal yang meliputi: jenis atap, jenis dinding, jenis lantai rumah, serta luas lantai rumah.

#### Bab IV Kelengkapan Fasilitas Perumahan

Membahas mengenai kelengkapan fasilitas perumahan di Provinsi Jawa Tengah, meliputi sumber penerangan, sumber air minum, tempat pembuangan akhir tinja, serta jarak tempat penampungan tinja dengan sumber air.

#### Bab V Penutup

Menjelaskan kesimpulan serta memberikan saran dan rekomendasi.

<http://jateng.bps.go.id>



## BAB II

### METODOLOGI

#### 2.1 Sumber Data

Publikasi Statistik Perumahan Provinsi Jawa Tengah tahun 2015 ini menggunakan data Survei Sosial Ekonomi (Susenas) Maret tahun 2015. Jumlah sampel yang dicakup dalam Susenas Maret tahun 2015 sebanyak 27.520 rumah tangga sampel yang meliputi wilayah perkotaan dan perdesaan dan tersebar di 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Data dan informasi perumahan dari sampel rumah tangga dikumpulkan menggunakan daftar VSEN15.K.

Dalam Susenas 2015, data Kor (pokok) yang dikumpulkan mencakup keterangan umum ART, keterangan tempat lahir dan tempat tinggal 5 tahun yang lalu, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, fertilitas, perumahan, pengeluaran rumah tangga, keterangan sosial ekonomi lainnya, teknologi komunikasi dan informasi, serta keterangan sumber penghasilan rumah tangga. Sedangkan data mengenai keterangan perumahan rumah tangga meliputi: penguasaan tempat tinggal, jenis atap, jenis dinding, jenis dan luas lantai, sumber air minum, fasilitas tempat buang air besar, sumber penerangan, dan bahan bakar/energi utama untuk memasak.

#### 2.2 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data di setiap rumah tangga terpilih dilakukan melalui wawancara langsung antara pencacah dengan responden. Keterangan tentang rumah tangga dikumpulkan melalui wawancara dengan kepala rumah tangga, suami/istri kepala rumah tangga, atau anggota rumah tangga lain yang mengetahui dengan pasti karakteristik yang ditanyakan.

#### 2.3 Konsep dan Definisi

Mengingat data yang digunakan dalam publikasi ini adalah data Susenas, maka konsep dan definisi dalam publikasi ini pun menggunakan konsep dan definisi Susenas, yaitu:

**Rumah tangga**, yang digunakan dalam penulisan ini adalah rumah tangga biasa, yaitu seorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus, dan biasanya tinggal bersama serta makan dari satu dapur. Makan dari satu dapur maksudnya adalah jika pengaturan kebutuhan sehari-hari dikelola bersama menjadi satu. Rumah tangga biasanya terdiri dari ibu, bapak



dan anak, selain itu yang termasuk/dianggap sebagai rumah tangga biasa antara lain:

- Seseorang yang menyewa kamar atau sebagian bangunan sensus tetapi makannya diurus sendiri.
- Keluarga yang tinggal terpisah di dua bangunan sensus tetapi makannya dari satu dapur, asal kedua bangunan sensus tersebut dalam blok sensus yang sama.
- Pondokan dengan makan (indekost) yang pemondoknya kurang dari 10 orang. Pemondok dianggap sebagai anggota rumah tangga induk semangnya.
- Beberapa orang yang bersama-sama mendiami satu kamar dalam bangunan sensus walaupun mengurus makannya sendiri-sendiri dianggap satu rumah tangga biasa.

**Bangunan Fisik**, adalah tempat berlindung yang mempunyai dinding, lantai dan atap, baik tetap maupun sementara, baik digunakan untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal. Bangunan dapur, kamar mandi, garasi, dan lainnya yang terpisah dari bangunan induk dianggap bagian dari bangunan induk tersebut (satu bangunan) jika terletak dalam satu pekarangan. Bangunan yang luas lantainya kurang dari 10 m<sup>2</sup> dan tidak digunakan untuk tempat tinggal dianggap bukan bangunan fisik.

**Bangunan Sensus**, adalah sebagian atau seluruh bangunan fisik yang mempunyai pintu keluar masuk sendiri dan dalam satu kesatuan penggunaan.

**Status penguasaan bangunan tempat tinggal**, dibedakan menjadi tujuh kategori, yaitu:

**Rumah milik sendiri**, jika tempat tinggal tersebut pada saat pencacahan benar-benar sudah menjadi milik kepala rumah tangga atau salah seorang anggota rumah tangga. Rumah yang dibeli secara angsuran melalui kredit bank atau rumah dengan status sewa beli dianggap rumah milik sendiri.

**Rumah kontrak**, jika tempat tinggal tersebut disewa oleh kepala rumah tangga atau salah seorang anggota rumah tangga dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kontrak antara pemilik dan pemakai. Cara pembayaran biasanya sekaligus di muka atau dapat diangsur menurut persetujuan kedua belah pihak. Pada akhir masa perjanjian pihak pengontrak harus meninggalkan tempat tinggal yang didiami dan bila kedua belah pihak setuju jika diperpanjang kembali dengan mengadakan perjanjian kontrak baru.

**Rumah sewa**, jika tempat tinggal tersebut disewa oleh kepala rumah tangga atau salah seorang anggota rumah tangga dengan pembayaran sewanya secara teratur dan terus menerus tanpa batasan waktu tertentu.

**Rumah dinas**, jika tempat tinggal tersebut dimiliki dan disediakan oleh suatu instansi tempat bekerja salah satu anggota rumah tangga baik dengan membayar sewa maupun tidak.

**Rumah bebas sewa** milik orang lain, jika tempat tinggal tersebut diperoleh dari pihak lain (bukan famili/orang tua) dan ditempati/didiami oleh rumah tangga bersangkutan tanpa mengeluarkan suatu pembayaran apapun.

**Rumah milik orang tua/sanak/saudara**, jika tempat tinggal tersebut bukan milik sendiri melainkan milik orang tua/sanak/saudara dan tidak mengeluarkan suatu pembayaran apapun untuk mendiami tempat tinggal tersebut.

**Lainnya**, jika tempat tinggal tersebut tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu kategori di atas, misalnya tempat tinggal milik bersama, rumah adat.

**Atap**, adalah penutup bagian atas suatu bangunan sehingga orang yang mendiami di bawahnya merasa terlindung dari terik matahari, hujan dan sebagainya. Untuk bangunan bertingkat, atap yang dimaksud adalah bagian teratas dari bangunan tersebut. Jenis atap dibedakan menjadi tujuh kategori, yaitu:

**Beton**, adalah atap yang terbuat dari campuran semen, kerikil dan pasir yang diaduk dengan air.

**Genteng**, adalah atap yang dibuat dari tanah liat yang dicetak dan dibakar. Termasuk juga genteng beton, genteng *fiber cement* dan genteng keramik.

**Sirap**, adalah atap yang terbuat dari kepingan kayu yang tipis dan biasanya terbuat dari kayu ulin atau kayu besi.

**Seng**, adalah atap yang terbuat dari bahan seng.

**Asbes**, adalah atap yang terbuat dari campuran asbes dan semen.

**Ijuk/rumbia**, adalah atap yang terbuat dari serat pohon aren/enau atau sejenisnya yang umumnya berwarna hitam.

**Lainnya**, adalah atap selain jenis yang disebutkan di atas, misalnya bambu, daun-daunan, kardus.

**Dinding**, adalah sisi luar/batas dari suatu bangunan atau penyekat dengan bangunan fisik lain. Bila bangunan menggunakan lebih dari satu jenis dinding maka yang dicatat adalah yang nilainya lebih tinggi.

**Tembok**, adalah dinding yang terbuat dari susunan bata merah atau batako biasanya dilapisi plesteran semen.

**Kayu**, adalah dinding yang terbuat dari kayu.

**Bambu**, adalah dinding yang terbuat dari bambu, termasuk dinding yang terbuat dari anyaman bambu dengan luas kurang lebih 1 m x 1 m yang dibingkai dengan balok, kemudian diplester dengan campuran semen dan pasir.

**Lainnya**, adalah selain tembok, kayu, dan bambu.

**Lantai**, adalah bagian bawah/ dasar/ alas bangunan tempat tinggal responden baik terbuat dari tanah maupun bukan tanah seperti keramik, marmer, papan, semen dan sejenisnya. Vinil atau karpet tidak dianggap sebagai bagian dari jenis lantai.

**Luas lantai**, adalah luas lantai yang ditempati dan digunakan untuk keperluan sehari-hari (sebatas atap). Lumbung padi, kandang ternak, lantai jemur (lamporan semen), dan ruangan khusus untuk usaha (misalnya warung) yang tidak digunakan untuk keperluan sehari-hari tidak dihitung dalam luas lantai. Bila rumah dihuni oleh lebih dari satu rumah tangga, maka luas lantai hunian setiap rumah tangga adalah luas lantai ruangan yang dipakai bersama dibagi dengan banyaknya rumah tangga ditambah dengan luas lantai pribadi rumah tangga yang bersangkutan. Untuk rumah bertingkat, luas lantai adalah jumlah luas lantai dari semua tingkat yang ditempati.

**Sumber air minum**, adalah sumber air yang digunakan rumah tangga untuk minum dengan volume air paling banyak.

**Air kemasan bermerek** adalah air yang diproduksi dan didistribusikan oleh suatu perusahaan dalam kemasan botol atau gelas.

**Air isi ulang** adalah air yang diproduksi melalui proses penjernihan dan tidak memiliki merek.

Dalam publikasi ini, air kemasan bermerek dan air isi ulang dimasukkan sebagai air dalam kemasan.

**Air ledeng meteran** adalah air yang diproduksi melalui proses penjernihan dan penyehatan sebelum dialirkan kepada konsumen melalui instalasi berupa saluran air. Sumber air minum ini diusahakan oleh PAM, PDAM atau BPAM, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta.

**Air ledeng eceran** adalah air yang diproduksi melalui proses penjernihan dan penyehatan (air PAM) namun disalurkan ke konsumen melalui pedagang air keliling/pikulan.

**Air sumur bor/pompa** adalah air tanah yang cara pengambilannya dengan menggunakan pompa tangan, pompa listrik, atau kincir angin termasuk sumur artesis (sumur pantek).

**Sumur terlindung** adalah air yang berasal dari dalam tanah yang digali dan lingkaran sumur tersebut dilindungi oleh tembok pali sedikit 0,8 meter di atas tanah dan 3 meter ke bawah tanah, serta ada lantai semen sejauh 1 meter dari lingkaran sumur.

**Sumur tak terlindung** adalah air yang berasal dari dalam tanah yang digali dan lingkaran sumur tersebut tidak dilindungi oleh tembok dan lantai sejauh 1 meter dari lingkaran sumur.

**Mata air terlindung** adalah sumber air permukaan dimana air timbul dengan sendirinya dan terlindung dari air bekas pakai, bekas mandi, mencuci, atau lainnya.

**Mata air tak terlindung** adalah sumber air permukaan dimana air timbul dengan sendirinya, tetapi tidak terlindung dari air bekas pakai, bekas mandi, mencuci, atau lainnya.

**Air permukaan** adalah apabila rumah tangga menggunakan air dari sungai, danau, waduk, kolam, irigasi sebagai sumber utama air minum.

**Air hujan** adalah apabila rumah tangga menggunakan air hujan sebagai sumber air utama air minum.

**Lainnya** adalah sumber air selain di atas seperti air waduk/danau.

**Jarak sumber air minum ke tempat penampungan kotoran/tinja terdekat** adalah jarak antara sumber air minum yang berasal dari pompa/sumur/mata air ke tempat penampungan limbah, kotoran ternak, dan tinja yang terdekat, baik yang ada di lingkungan rumah tangga responden itu sendiri maupun tetangga.

**Cara memperoleh air minum** dikategorikan menjadi dua, yaitu:

**Membeli**, apabila membeli air untuk minum, seperti: ledeng dari PAM/ PDAM/ BPAM, air kemasan, atau menyuruh tetangga untuk mengambil air dari waduk dengan memberi upah.

**Langganan** adalah apabila membeli air untuk minum secara periodik/bulanan.

Dalam publikasi ini, air minum yang diperoleh dengan cara membeli dan langganan dikategorikan sebagai membeli.

**Tidak membeli** adalah jika diperoleh dengan usaha sendiri tanpa harus membayar.

**Penggunaan fasilitas air minum** adalah instalasi air minum yang dikelola oleh PAM/ PDAM atau non PAM/ PDAM termasuk sumur gali dan sumur pompa, tidak termasuk air kemasan bermerek, air isi ulang, dan ledeng eceran. Rumah tangga yang menggunakan air sungai, danau dan air hujan dianggap tidak mempunyai fasilitas, kecuali jika ada proses penjernihan yang dilakukan oleh suatu unit usaha

atau rumah tangga dengan mesin penjernih air. Adapun penggunaan fasilitas air minum dibedakan dalam empat kategori, yaitu:

**Sendiri**, jika fasilitas tersebut hanya digunakan oleh rumah tangga bersangkutan saja.

**Bersama**, jika fasilitas tersebut hanya digunakan oleh rumah tangga responden dengan beberapa rumah tangga tertentu.

**Umum**, jika fasilitas tersebut dapat digunakan oleh siapa saja, termasuk rumah tangga responden.

**Tidak ada fasilitas**, jika rumah tangga bersangkutan tidak mempunyai fasilitas air minum, walaupun ada jarak > 2,5 km termasuk jika mengambil air langsung dari sungai atau air hujan.

**Fasilitas buang air besar**, adalah ketersediaan jamban/kakus yang dapat digunakan oleh rumah tangga responden. Fasilitas tempat buang air besar dibedakan dalam empat kategori, yaitu:

**Sendiri**, jika fasilitas tersebut hanya digunakan oleh rumah tangga responden saja.

**Bersama**, jika fasilitas tersebut hanya digunakan oleh rumah tangga responden dengan beberapa rumah tangga tertentu.

**MCK Komunal** singkatan dari Mandi Cuci dan Kakus adalah salah satu sarana fasilitas umum yang digunakan bersama oleh beberapa keluarga untuk keperluan mandi, mencuci dan buang air di lokasi permukiman tertentu yang dinilai berpenduduk cukup padat dan tingkat kemampuan ekonomi rendah.

**Umum**, jika fasilitas tersebut dapat digunakan oleh siapa saja, termasuk rumah tangga responden.

**Tidak ada**, jika rumah tangga bersangkutan tidak mempunyai fasilitas buang air besar.

### **Jenis kloset**

**Kloset** adalah tempat duduk/jongkok yang digunakan di WC/kakus, dibedakan menjadi empat macam, yakni:

**Leher angsa**, adalah jamban/kakus yang dibawah dudukannya terdapat saluran berbentuk huruf “U” (seperti leher angsa) dengan maksud menampung air untuk menahan agar bau tinja tidak keluar.

**Plengsengan**, adalah jamban/kakus yang dibawah dudukannya terdapat saluran rata yang dimiringkan ke tempat pembuangan kotoran.

**Cempung/cubluk**, adalah jamban/kakus yang dibawah dudukannya tidak ada saluran sehingga tinja langsung ke tempat pembuangan akhirnya.

**Tidak pakai kloset**, adalah jika jamban/kakus tidak memakai kloset.

**Tempat pembuangan akhir tinja** dibedakan menjadi:

**Tangki/SPAL**, adalah tempat pembuangan akhir yang berupa bak penampungan, biasanya terbuat dari pasangan bata/batu atau beton baik yang mempunyai bak resapan maupun tidak, termasuk disini daerah permukiman yang mempunyai Sistem Pembuangan Air Limbah (SPAL) terpadu yang dikelola oleh pemerintah kota. Dalam sistem pembuangan limbah cair seperti ini, air limbah rumah tangga tidak ditampung di dalam tangki atau wadah semacamnya, tetapi langsung dialirkan ke suatu tempat pengolahan limbah cair. Di tempat pengolahan tersebut, limbah cair diolah sedemikian rupa (dengan teknologi tertentu) sehingga terpilah menjadi 2 bagian, yaitu lumpur dan air. Air hasil pengolahan ini dianggap aman untuk dibuang ke tanah atau badan air (sungai, danau, laut). Pada beberapa jenis jamban/kakus yang disediakan di tempat umum/kera-maian, seperti di taman kota, tempat penampungannya dapat berupa tong yang terbuat dari logam atau kayu. Tempat penampungan ini bisa dilepas untuk diangkut ke tempat pembuangan. Dalam hal demikian tempat pembuangan akhir dari jamban/kakus ini dianggap sebagai tangki.

**Kolam/sawah**, bila limbahnya dibuang ke kolam/sawah.

**Sungai/danau/laut**, bila limbahnya dibuang ke sungai/danau/laut.

**Lubang tanah**, bila limbahnya dibuang ke dalam lubang tanah yang tidak diberi pembatas/tembok (tidak kedap air).

**Pantai/tanah lapang/kebun**, bila limbahnya dibuang ke daerah pantai atau tanah lapang, termasuk dibuang ke kebun.

**Lainnya**, bila limbahnya dibuang ke tempat selain yang telah disebutkan di atas.

**Sumber penerangan**, adalah penerangan yang biasanya digunakan oleh rumah tangga bersangkutan sehari-hari. Bila rumah tangga menggunakan lebih dari satu sumber penerangan, yang dicatat sebagai sumber penerangan adalah yang mempunyai nilai lebih tinggi. Sumber penerangan dibedakan menjadi lima kategori, yaitu:

**Listrik PLN** adalah sumber penerangan listrik yang dikelola oleh PLN. Rumah tangga dikatakan menggunakan listrik baik menggunakan maupun tidak menggunakan meteran (volumetrik).

**Listrik non-PLN** adalah sumber penerangan listrik yang dikelola oleh instansi/pihak lain selain PLN termasuk yang menggunakan sumber

penerangan dengan accu (aki), generator, dan pembangkit listrik tenaga surya (yang tidak dikelola oleh PLN).

**Bukan Listrik** seperti petromak, aladin, sentir, pelita, obor, lampu karbit, lilin, biji jarak, kemiri, dan lain-lain.

<http://jateng.bps.go.id>

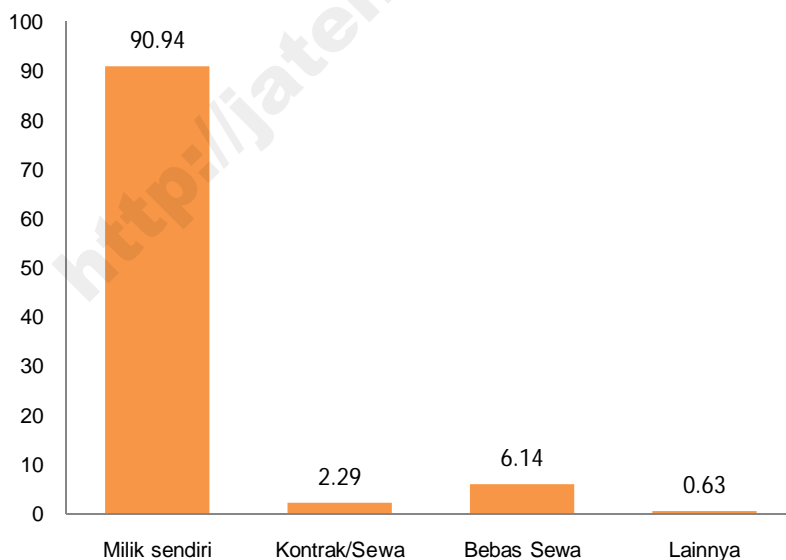
### BAB III POTRET KONDISI TEMPAT TINGGAL

Selain memiliki fungsi pokok sebagai tempat berlindung, rumah juga berfungsi sebagai sarana pembinaan keluarga, serta merupakan aset bagi pemiliknya seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman. Untuk mengetahui kondisi kesejahteraan suatu rumah tangga dapat dilihat dari status kepemilikan tempat tinggal, kualitas rumah tempat tinggal, serta fasilitas yang dimilikinya.

#### 3.1 Status Penguasaan Tempat Tinggal

Tempat tinggal merupakan kebutuhan yang sangat mendasar bagi kehidupan setiap orang atau suatu rumah tangga. Dalam pemenuhan kebutuhan tersebut tidak semua orang dapat memenuhinya dengan mudah. Kondisi ekonomi akan sangat memberikan pengaruh. Penduduk yang berpenghasilan lebih tinggi akan mempunyai kesempatan untuk memiliki rumah dengan mudah dibanding dengan penduduk yang berpenghasilan rendah.

**Gambar 1. Persentase Rumah tangga menurut Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal, 2015**



Sumber: Diolah dari Susenas 2015



Menurut hasil Susenas 2015, sebagian besar rumah tangga di Provinsi Jawa Tengah menempati rumah berstatus milik sendiri (90,94 persen) sedangkan sisanya sebesar 9,06 persen rumah tangga menempati rumah berstatus bukan milik sendiri. Rumah tangga yang menempati rumah berstatus bukan milik sendiri terdiri dari 2,29 persen menempati rumah berstatus kontrak/sewa, 6,14 persen menempati rumah berstatus bebas sewa dan 0,63 persen menempati rumah berstatus lainnya.

Jika dibandingkan penguasaan bangunan tempat tinggal antara perkotaan dengan perdesaan maka dapat terlihat bahwa persentase rumah tangga yang menempati rumah berstatus milik sendiri di daerah perkotaan (85,14 persen) berbeda signifikan dibandingkan dengan di daerah perdesaan (95,72 persen).

**Tabel 1. Persentase Rumah Tangga menurut Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal yang Ditempati dan Tipe Daerah, 2015**

<b>Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal</b>	<b>Perkotaan</b>	<b>Perdesaan</b>	<b>Perkotaan + Perdesaan</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
Milik Sendiri	85,14	95,72	90,94
Kontrak/sewa	4,60	0,39	2,29
Bebas sewa	9,10	3,70	6,14
Lainnya	1,16	0,19	0,63
<b>Jumlah</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Diolah dari Susenas 2015

Hal menarik yang bisa dicermati dari Tabel 1. adalah besarnya persentase rumah tangga di daerah perkotaan yang menempati tempat tinggal dengan status bebas sewa, tercatat sebesar 9,10 persen, berbeda signifikan dengan daerah perdesaan dengan status penguasaan tempat tinggal yang sama. Hal ini diduga karena daerah perkotaan biasanya mempunyai fasilitas yang lebih lengkap dan sebagai pusat kegiatan ekonomi dibandingkan daerah perdesaan. Kondisi ini berimbang pada tingginya harga tempat tinggal di daerah perkotaan dari pada daerah perdesaan, sehingga rumah tangga lebih memilih tinggal di rumah milik orang tua.

Tabel A.2. pada lampiran memperlihatkan bahwa persentase rumah tangga yang bertempat tinggal milik sendiri di wilayah kota lebih sedikit dari pada wilayah kabupaten, antara lain: Kota Surakarta (63,99 persen), Kota Tegal (64,85 persen), Kota Pekalongan (70,54 persen), Kota Magelang (73,31 persen), Kota Semarang

(74,85 persen), dan Kota Salatiga (81,05 persen). Bandingkan dengan wilayah kabupaten, persentase rumah tangga dengan status bangunan tempat tinggal milik sendiri terbesar antara lain: Kabupaten Grobogan (96,57 persen), Kabupaten Banjarnegara (96,21 persen) dan Kabupaten Pati (96,07 persen).

Sebaliknya, persentase rumah tangga dengan status tempat tinggal kontrak terbanyak terdapat di wilayah kota, yaitu Kota Surakarta (16,69 persen), Kota Salatiga (11,48 persen), Kota Magelang (10,57 persen) serta Kota Semarang (10,02 persen). Demikian halnya dengan rumah tangga dengan status penguasaan bangunan tempat tinggal bebas sewa milik orang tua, persentase terbesar terdapat di Kota Tegal yaitu mencapai 28,65 persen dari total rumah tangga, Kota Pekalongan (23,97 persen) dan Kota Surakarta (18,37 persen).

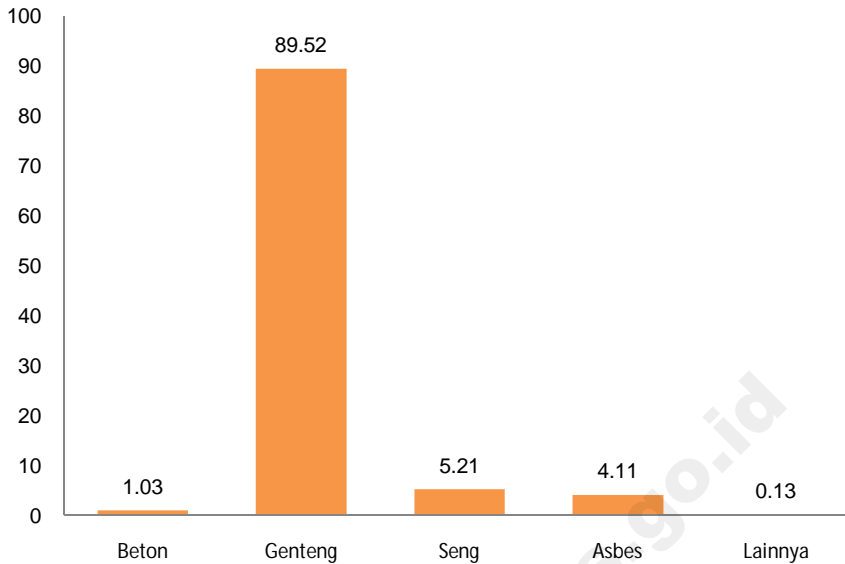
### **3.2 Kualitas Bangunan Tempat Tinggal**

Rumah merupakan tempat berlindung terhadap gangguan dari luar serta tempat berkumpul dan berinteraksi bagi anggota rumah tangga. Agar menjadi tempat yang nyaman dan sehat, rumah hendaknya sesuai standar kesehatan sehingga saat pembangunan rumah dimulai dengan pemilihan kualitas bahan bangunannya, seperti pemilihan jenis atap, dinding dan lantai. Sebagai catatan, kualitas bangunan tempat tinggal dalam publikasi ini lebih ditekankan pada kualitas dari sisi kesehatan.

#### **3.2.1 Atap Terlalu Bangunan Tempat Tinggal**

Atap merupakan salah satu bagian penting dari sebuah tempat tinggal mengingat fungsinya sebagai pelindung bagi penghuni rumah dari hujan maupun panas. Melihat pentingnya fungsi yang dimiliki oleh atap, maka jenis atap biasanya dipilih dari bahan yang mampu memberi perlindungan optimal. Atap tidak selalu mencerminkan tingkat kesejahteraan dari suatu rumah tangga karena pemilihan jenis atap juga menyesuaikan dengan kondisi geografis suatu wilayah. Di daerah dataran rendah, biasanya rumah tinggal memakai atap jenis genteng dengan tujuan untuk mengurangi suhu panas dalam rumah, sedangkan untuk daerah dataran tinggi, biasanya jenis atap seng banyak dipakai agar panas matahari yang diterima dapat disimpan sehingga dapat menghangatkan bagian dalam rumah.

**Gambar 2. Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Atap Terluas Bangunan Tempat Tinggal, 2015**



Sumber: Diolah dari Susenas 2015

Gambar 2. memperlihatkan bahwa sebagian besar rumah tangga, yaitu sekitar 89,52 persen dari total rumah tangga di Provinsi Jawa Tengah tinggal di rumah dengan atap terluas berjenis genteng. Sedangkan yang tinggal di rumah dengan atap terluas jenis seng mencapai 5,21 persen, jenis asbes sekitar 4,11 persen dan hanya 1,03 persen rumah tangga yang menggunakan beton sebagai atap untuk bangunan tempat tinggalnya. Namun demikian masih ada sekitar 0,13 persen rumah tangga yang rumahnya beratap lainnya.

Bila diamati lebih lanjut menurut tipe daerah, penggunaan atap jenis genteng merupakan jenis atap yang paling banyak digunakan baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. Dari Tabel 2. terlihat persentase rumah tangga yang tinggal dalam rumah beratap genteng di perdesaan sedikit lebih tinggi dari pada daerah perkotaan yaitu 89,62 persen berbanding 89,40 persen. Demikian pula untuk jenis atap seng, rumah tangga di daerah perdesaan secara persentase lebih banyak menggunakannya untuk atap terluas tempat tinggal mereka daripada rumah tangga di daerah perkotaan, tercatat 6,47 persen banding 3,70 persen.

**Tabel 2. Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Atap Terluas  
Bangunan Tempat Tinggal dan Tipe Daerah, 2015**

<b>Jenis Atap Terluas Bangunan Tempat Tinggal</b>	<b>Perkotaan</b>	<b>Perdesaan</b>	<b>Perkotaan + Perdesaan</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
Beton	1,65	0,52	1,03
Genteng	89,40	89,62	89,52
Seng	3,70	6,47	5,21
Asbes	5,10	3,29	4,11
Lainnya	0,15	0,10	0,13
<b>Jumlah</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

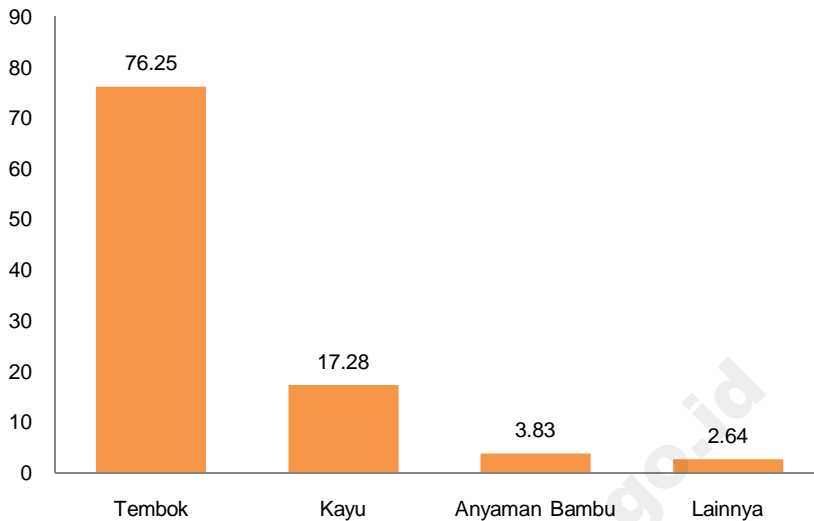
Sumber: Diolah dari Susenas 2015

Penggunaan atap jenis genteng paling banyak dipakai oleh rumah tangga di Kabupaten Boyolali (98,96 persen), Kabupaten Kudus (98,83 persen), Kabupaten Sragen (98,72 persen). Sedangkan di Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Pemalang merupakan wilayah di Jawa Tengah dengan persentase rumah tangga yang tinggal di rumah beratap genteng terendah, yaitu masing-masing 45,92 persen, 48,95 persen dan 71,83 persen (Tabel A.3.).

### **3.2.2 Jenis Dinding Bangunan Tempat Tinggal Terluas**

Agar memenuhi standar kesehatan, jenis dinding yang baik adalah dinding dari bahan yang kedap air sehingga terhindar dari basah dan lembab, serta tidak berlumut. Dari data yang tersedia, sebagian besar rumah tangga di Provinsi Jawa Tengah menggunakan jenis dinding tembok yakni tercatat sekitar 76,25 persen dari total rumah tangga di Jawa Tengah. Hal ini berarti masih terdapat sekitar 23,75 persen rumah tangga di Jawa Tengah yang menggunakan dinding selain tembok, sebab tidak menutup kemungkinan pada daerah tertentu masyarakat lebih cenderung memilih dinding berjenis bukan tembok untuk tempat tinggalnya, seperti menggunakan kayu, bambu dan lainnya meskipun dari segi keamanan, jenis dinding tembok lebih memberikan rasa aman dibandingkan jenis bukan tembok.

**Gambar 3. Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Dinding Terluas Bangunan Tempat Tinggal, 2015**



Sumber: Data Olah Susenas 2015

Bila dilihat menurut tipe daerah, dinding berjenis tembok lebih banyak dipakai oleh rumah tangga di daerah perkotaan dibandingkan dengan daerah perdesaan, yaitu 87,59 persen berbanding 66,88 persen. Berbeda halnya dengan dinding jenis kayu, persentase rumah tangga di daerah perdesaan yang tinggal di rumah dengan dinding terluas jenis ini mencapai 24,81 persen, sedangkan di daerah perkotaan mencapai 8,16 persen (Tabel 3.).

**Tabel 3. Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Dinding Terluas Bangunan Tempat Tinggal dan Tipe Daerah, 2015**

Jenis Dinding Terluas Bangunan Tempat Tinggal	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Tembok	87,59	66,88	76,25
Kayu	8,16	24,81	17,28
Anyaman Bambu	2,43	4,99	3,83
Lainnya	1,82	3,32	2,64
<b>Jumlah</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

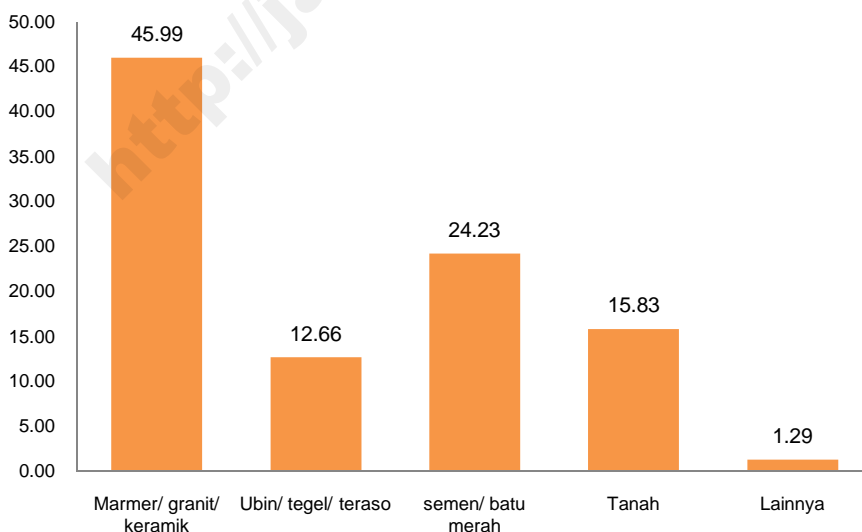
Sumber: Diolah dari Susenas 2015

Bila dilihat menurut kabupaten/kota, dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, Kota Tegal dan Kabupaten Klaten memiliki persentase rumah tangga yang memiliki rumah dengan dinding terluas jenis tembok terbesar yaitu masing-masing 98,27 persen dan 97,01 persen. Sebaliknya Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Blora merupakan wilayah yang memiliki persentase rumah tangga yang bertempat tinggal berdinding terluas tembok terendah, yaitu masing-masing sekitar 15,29 persen dan 20,24 persen. Namun demikian di kedua kabupaten tersebut persentase rumah tangga yang bertempat tinggal dengan dinding terluas menggunakan kayu paling tinggi yakni 80,21 persen (Kabupaten Grobogan) dan 75,59 persen (Kabupaten Blora). Hal ini dikarenakan masyarakat di kedua kabupaten tersebut lebih menyukai menggunakan kayu sebagai dinding bangunan daripada dinding jenis tembok, selain juga didukung oleh kondisi wilayahnya yang masih relatif banyak hutan penghasil kayu (Tabel. A.4.).

### 3.2.3 Jenis Lantai Terluas

Ditinjau dari sisi kesehatan, lantai bukan tanah dianggap lebih baik dibandingkan lantai tanah, bahkan rumah berlantai tanah dianggap sebagai salah satu kategori rumah tidak layak huni. Urutan dari yang paling baik untuk lantai bukan tanah menurut kualitasnya adalah keramik/marmer/granit, ubin/tegel/teraso, semen/batu merah, kayu/papan, bambu dan lainnya.

**Gambar 4. Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Lantai Terluas Bangunan Tempat Tinggal, 2015**



Sumber: Diolah dari Susenas 2015

Jenis lantai terluas sebagian besar rumah tangga di Provinsi Jawa Tengah sudah menggunakan marmer/keramik/granit yaitu sebanyak 45,99 persen, berlantai semen/bata merah sekitar 24,23 persen dan 12,66 persen menggunakan ubin/tegel/teraso. Namun demikian masih terdapat sekitar 15,83 persen rumah tangga yang bangunan tempat tinggalnya berlantai tanah.

**Tabel 4. Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Lantai Terluas Bangunan Tempat Tinggal dan Tipe Daerah, 2015**

Jenis Lantai Terluas Bangunan Tempat Tinggal	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Marmer/keramik/granit	55,51	38,12	45,99
Ubin/tegel/teraso	14,14	11,43	12,66
Semen/batu merah	21,93	26,14	24,23
Kayu/papan kualitas rendah	0,24	0,54	0,40
Tanah	7,79	22,47	15,83
Lainnya	0,39	1,30	0,89
<b>Jumlah</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Diolah dari Susenas 2015

Menurut tipe daerah, sebagian besar rumah tangga dengan jenis lantai marmer/keramik/granit terdapat di daerah perkotaan (55,51 persen) sedangkan di perdesaan hanya 38,12 persen. Sementara di daerah perdesaan, sekitar 26,14 persen rumah tangga masih menempati bangunan berlantai semen, bahkan 22,47 persen bertempat tinggal dengan lantai tanah.

Kota Pekalongan, Kota Tegal dan Kota Semarang merupakan wilayah dengan persentase rumah tangga yang bertempat tinggal memakai lantai jenis marmer/keramik/granit tertinggi di Provinsi Jawa Tengah, yakni masing-masing mencapai 70,89 persen, 69,025 persen dan 67,91 persen. Sebaliknya persentase rumah tangga yang tinggal dalam rumah berlantai terluas jenis marmer/keramik/granit terendah adalah di Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Blora masing-masing hanya sekitar 11,80 persen dan 17,29 persen (Tabel A.5.).

Di sisi lain masih cukup banyak rumah tangga yang menempati bangunan tempat tinggal dengan lantai terluas jenis tanah, bahkan lebih dari separuh dari total rumah tangganya, tercatat persentase terbesar berada di Kabupaten Blora dan Kabupaten Grobogan, masing-masing mencapai 53,52 persen dan 51,84 persen. Demikian halnya untuk wilayah kota, masih terdapat rumah tangga yang tinggal dalam bangunan berlantai tanah, seperti Kota Salatiga (4,18 persen), Kota

Semarang (3,41 persen), Kota Pekalongan (2,65 persen), Kota Tegal (2,61 persen), Kota Magelang (1,74 persen) dan Kota Surakarta (1,69 persen).

### 3.3 Luas Lantai

Luas lantai rumah seringkali dianggap sebagai gambaran untuk menilai kemampuan sosial ekonomi masyarakat. Selain itu, luas lantai juga menentukan tingkat kesehatan penghuninya. Luas lantai yang sempit dapat mengurangi konsumsi oksigen penghuni rumah serta mempercepat proses penularan penyakit. Selama ini alat ukur yang dipakai adalah luas lantai perkapita, yaitu rata-rata luas lantai untuk setiap anggota rumah tangga atau dengan bahasa matematisnya adalah keseluruhan luas lantai dibagi total penduduk.

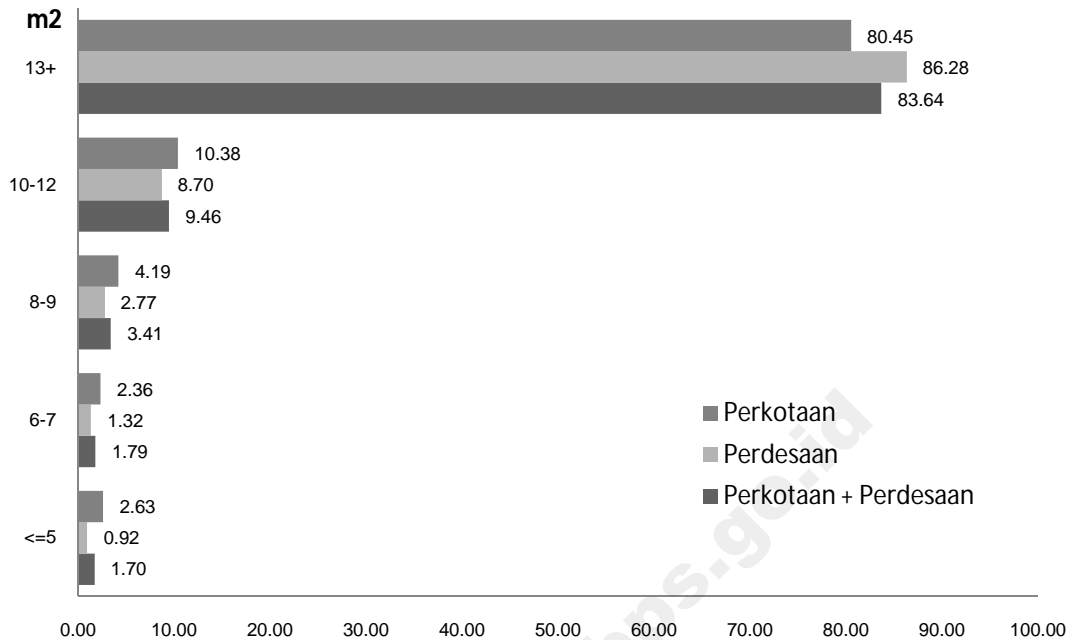
Menurut Kementerian Kesehatan, ukuran luas lantai yang ideal digunakan per orang minimal adalah 8 meter persegi, sedangkan menurut *World Health Organization* (WHO) serta *American Public Health Association* (APHA) yang telah disesuaikan dengan kondisi di Indonesia, ukuran luas lantai yang ideal digunakan per orang minimal adalah 10 meter persegi.

Berdasarkan klasifikasi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan tersebut maka persentase rumah tangga dengan ukuran luas lantai perkapita ideal (minimal 8 meter persegi) sebesar 96,51 persen. Sementara itu, menurut klasifikasi WHO dan APHA maka persentase rumah tangga dengan ukuran luas lantai per kapita ideal (minimal 10 meter persegi) sebesar 93,10 persen (Gambar 5.).

Pada Gambar 5. disajikan persentase rumah tangga menurut luas lantai perkapita. Sebagian besar rumah tangga di Provinsi Jawa Tengah mempunyai luas lantai perkapita sebesar 13 meter persegi atau lebih (83,64 persen). Namun demikian, masih ada sekitar 3,49 persen rumah tangga yang masih menempati rumah yang belum memenuhi ukuran luas lantai perkapita ideal menurut klasifikasi Kementerian Kesehatan dan 6,90 persen yang belum memenuhi ukuran luas lantai perkapita ideal menurut klasifikasi WHO dan APHA.



**Gambar 5. Persentase Rumah Tangga menurut Luas Lantai Per Kapita, 2015**



Sumber: Diolah dari Susenas 2015

Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Grobogan, dan Kabupaten Blora merupakan tiga kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dengan persentase rumah tangga yang menempati tempat tinggal dengan luas lantai perkapita lebih dari 13 m<sup>2</sup> terbesar, yaitu masing-masing 95,49 persen, 95,40 persen dan 95,27 persen. Namun demikian masih terdapat rumah tangga yang menghuni tempat tinggal dengan luas lantai  $\leq 5$  m<sup>2</sup>, dengan persentase terbesar berada di Kota Surakarta yaitu sekitar 9,94 persen, diikuti Kota Semarang (6,12 persen) dan Kota Magelang (4,73 persen) (Tabel. A.6.). Hal ini diduga rumah tangga tersebut menempati tempat tinggal dengan status kontrak/sewa.

## BAB IV

### KELENGKAPAN FASILITAS PERUMAHAN

Fasilitas rumah tidak hanya penting dari sisi kenyamanan penghuninya, namun yang tidak kalah penting adalah dari sisi kesehatan. Dengan fasilitas yang memadai diharapkan dapat menunjang segala aktivitas penghuninya serta membantu penghuninya untuk hidup sehat. Berikut ini akan dibahas fasilitas-fasilitas dasar yang semestinya tersedia dalam setiap rumah untuk menunjang kenyamanan dan kesehatan para penghuninya. Fasilitas-fasilitas dasar tersebut adalah penerangan, air minum/air bersih, tempat buang air besar.

#### 4.1 Sumber Penerangan

Rumah yang baik harus memiliki fasilitas penerangan yang cukup. Karena dengan penerangan yang cukup, manusia bisa hidup sehat dan nyaman beraktivitas. Pada siang hari umumnya masyarakat memanfaatkan cahaya matahari sebagai sumber penerangan. Namun bila di malam hari, masyarakat menggunakan beberapa alternatif sumber penerangan seperti listrik, petromak dan obor.

Sumber penerangan yang dicakup dalam publikasi ini adalah listrik dan bukan listrik. Listrik meliputi listrik yang bersumber dari PLN (Perusahaan Listrik Negara) maupun non PLN, seperti sumber penerangan dari accu (aki), generator, pembangkit listrik tenaga surya (yang tidak dikelola oleh PLN) dan pembangkit listrik tenaga air ( yang tidak dikelola oleh PLN). Sedangkan, sumber penerangan bukan listrik meliputi petromak/lampu aladin, pelita/sentir/obor, dan lainnya.

Seiring perkembangan jaman, listrik semakin menjadi kebutuhan mendasar bagi masyarakat, sehingga tidak mengherankan jika hampir semua rumah tangga sudah menggunakan listrik, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun swadaya sendiri.

Seperti yang terlihat pada Tabel 5. pada umumnya masyarakat di Jawa Tengah sudah dapat menikmati listrik sebagai sumber penerangan. Pada tahun 2015 tercatat sebesar 99,92 persen dari total rumah tangga di Jawa Tengah telah menggunakan listrik sebagai sumber penerangan utama, baik yang berasal dari PLN maupun Non PLN. Ini berarti masih terdapat 0,08 persen dari total rumah tangga di Jawa Tengah yang menggunakan bukan listrik sebagai sumber penerangan dalam rumah tinggalnya. Meskipun demikian jika dibandingkan

dengan keadaan pada tahun-tahun sebelumnya, jumlah rumah tangga yang menggunakan sumber penerangan bukan listrik mengalami penurunan.

**Tabel 5. Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan Bangunan Tempat Tinggal, 2013 - 2015**

Sumber Penerangan	Tahun		
	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)
Listrik PLN	99,50	99,66	99,52
Listrik Non PLN	0,26	0,13	0,40
Bukan Listrik	0,24	0,21	0,08
Total	100,00	100,00	100,00

Sumber: Diolah dari Susenas 2012- 2015

Sumber penerangan listrik juga sudah menyebar sampai ke pelosok perdesaan. Sekitar 99,35 persen rumah tangga di daerah perdesaan di Provinsi Jawa Tengah telah memanfaatkan listrik PLN sebagai sumber penerangan, dan 0,54 persen menggunakan listrik non PLN. Sementara di perkotaan persentase rumah tangga yang telah memanfaatkan listrik PLN mencapai 99,72 persen, dan sekitar 0,23 persen menggunakan listrik non PLN sebagai sumber penerangan. Meski demikian masih ada sekitar 0,05 persen rumah tangga di perkotaan yang belum menikmati fasilitas listrik.

**Tabel 6. Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Penerangan Bangunan Tempat Tinggal dan Tipe Daerah, 2015**

Sumber Penerangan	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Listrik PLN	99,72	99,35	99,52
Listrik Non PLN	0,23	0,54	0,40
Bukan Listrik	0,05	0,11	0,08
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: Diolah dari Susenas 2015

Persentase rumah tangga yang menggunakan sumber penerangan utama listrik PLN paling sedikit berada di Kabupaten Pekalongan (98,09 persen) dan Kabupaten Jepara (98,41 persen). Di beberapa kabupaten/kota masih terdapat rumah tangga yang menggunakan sumber penerangan utama bukan listrik seperti di Kabupaten Kebumen yang merupakan wilayah dengan persentase rumah

tangga yang menggunakan sumber penerangan bukan listrik terbesar di Jawa Tengah, yaitu mencapai 0,53 persen. Bahkan di Kota Surakarta masih terdapat rumah tangga yang sumber penerangan utamanya menggunakan bukan listrik, jumlahnya mencapai 0,09 persen rumah tangga. (Tabel. A.7.).

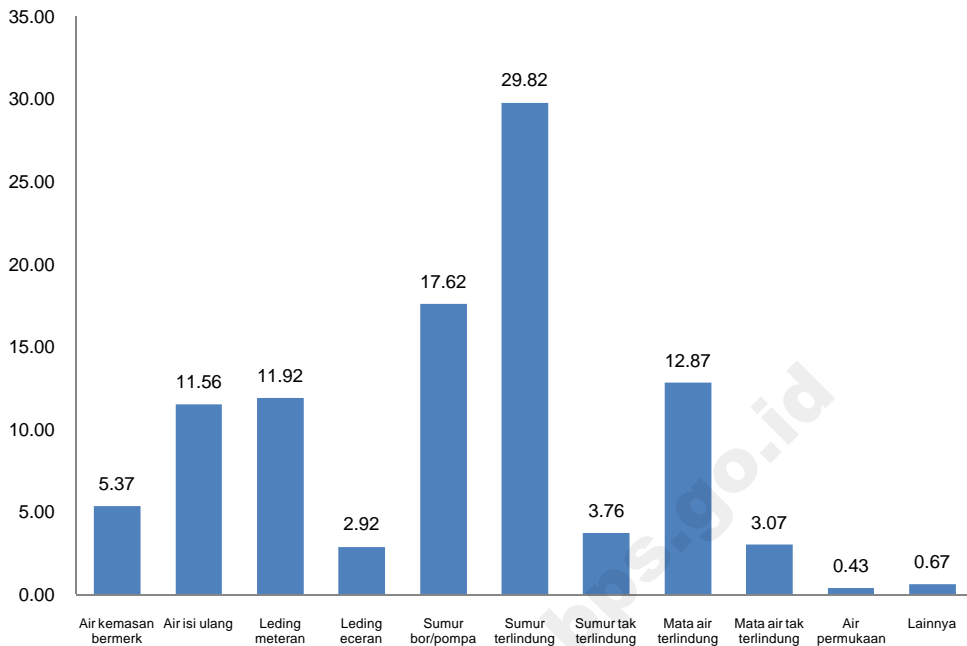
## 4.2 Air Minum

Air bersih merupakan kebutuhan manusia yang paling mendasar, terutama untuk kebutuhan minum dan memasak. Dalam satu hari seseorang membutuhkan air minum rata-rata 1,5 liter (sekitar 8 gelas). Di samping pemenuhan kebutuhan akan air harus mencukupi, tentunya harus diperhatikan pula faktor kebersihan dan kesehatan air yang digunakan. Ketiadaan air bersih dapat mengakibatkan berbagai penyakit, seperti diare dan cacingan. Ketersediaan air bersih kini menjadi salah satu prioritas utama program pembangunan mengingat ketersediaan air bersih yang semakin tidak berimbang dengan pertambahan jumlah penduduk.

Ketersediaan air bersih dalam rumah tangga dapat dilihat dari sumber air minum yang digunakan serta jarak sumber air minum ke tempat penampungan limbah/kotoran/tinja terdekat. Air bersih dikatakan tersedia dalam rumah tangga jika sumber air minumnya terlindung, seperti diperoleh dari air kemasan bermerk, air isi ulang, leding meteran, leding eceran, sumur bor/pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung. Sumber air minum terlindung tersebut dianggap merupakan sumber air bersih dengan catatan sumur bor/pompa, sumur terlindung, dan mata air terlindung memiliki jarak lebih dari 10 meter ke tempat penampungan limbah/kotoran/tinja terdekat. Bukan air bersih disini mencakup sumber air minum tidak terlindung seperti sumur tak terlindung, mata air tak terlindung, air sungai, air hujan, dan lainnya.

Pada tahun 2015, sebagian besar (92,08 persen) rumah tangga di Provinsi Jawa Tengah menggunakan sumber air minum terlindung, sedangkan sisanya (7,92 persen) menggunakan sumber air minum dari sumber tak terlindung (Gambar 6.). Dari Sumber air minum terlindung yang digunakan oleh rumah tangga, sebagian besar rumah tangga menggunakan sumber air minum yang berasal dari sumur terlindung, yaitu sekitar 29,82 persen, sumur bor/pompa (17,62 persen) serta air yang berasal dari mata air terlindung (12,87 persen).

**Gambar 6. Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Air Minum, 2015**



Sumber: Diolah dari Susenas 2015

Tabel 7. menunjukkan adanya perbedaan sumber air minum di daerah perkotaan dan perdesaan. Di perkotaan, persentase rumah tangga yang menggunakan sumber air minum dari ledeng meteran jauh lebih besar dari pada di perdesaan, yaitu 17,87 persen berbanding 6,99 persen. Demikian pula dengan penggunaan sumber air minum dari air kemasan bermerk, air isi ulang, ledeng eceran dan sumur bor/pompa, rumah tangga yang menggunakan sumber air minum jenis tersebut persentasenya juga lebih besar dibandingkan dengan daerah perdesaan. Namun sebaliknya, persentase rumah tangga di daerah perdesaan yang menggunakan sumber air minum dari sumur terlindung, mata air terlindung, air hujan dan air permukaan lebih besar dibandingkan di daerah perkotaan.

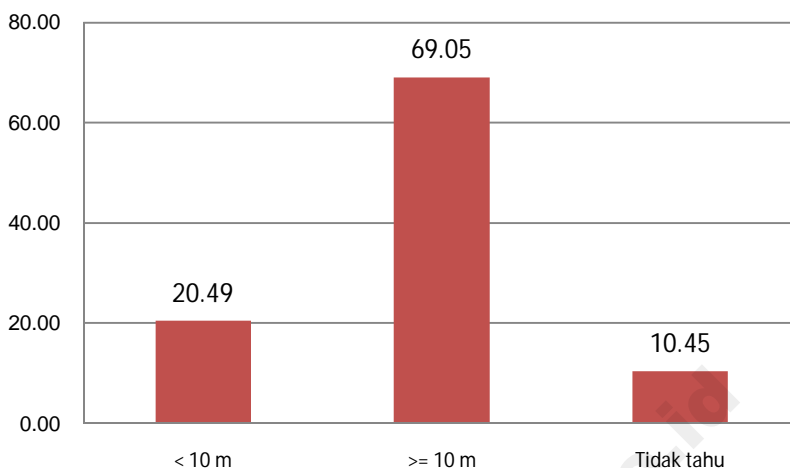
**Tabel 7. Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Air Minum dan Tipe Daerah, 2015**

Sumber Air Minum	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Air minum kemasan bermerk	8,62	2,68	5,37
Air isi ulang	13,35	10,09	11,56
Leding meteran	17,87	6,99	11,92
Leding eceran	4,79	1,36	2,92
Sumur bor/pompa	19,76	15,85	17,62
Sumur terlindung	28,23	31,13	29,82
Sumur tak terlindung	2,17	5,06	3,76
Mata air terlindung	4,17	20,06	12,87
Mata air tak terlindung	0,64	5,08	3,07
Air permukaan	0,16	0,65	0,43
Air hujan	0,15	0,99	0,61
Lainnya	0,07	0,04	0,06
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: Diolah dari Susenas 2015

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, jarak sumber air minum ke tempat penampungan tinja juga menjadi syarat ketersediaan air bersih. Menurut Departemen Kesehatan, agar tidak mencemari sumber air minum, maka lubang penampungan tinja sebaiknya berjarak 10-15 meter dari sumber air bersih. Berdasarkan Gambar 7. tercatat bahwa sekitar 69,05 persen rumah tangga sudah memiliki sumber air minum yang berjarak lebih dari 10 meter dari tempat penampungan tinja terdekat. Sementara itu, rumah tangga yang tidak mengetahui jarak sumber air minumnya ke tempat penampungan tinja mencapai 10,45 persen.

**Gambar 7. Persentase Rumah tangga menurut Jarak Sumber Air Minum ke Tempat Penampungan Limbah/Kotoran/Tinja Terdekat, 2015**



Sumber: Diolah dari Susenas 2015

Aspek yang tidak kalah penting dalam penyediaan air minum bagi rumah tangga adalah bagaimana rumah tangga tersebut mendapatkan air minum. Air minum yang dikategorikan sebagai membeli antara lain yang bersumber dari leding PAM/PDAM/BPAM, air kemasan, atau menyuruh tetangga untuk mengambil air dari waduk dengan memberi upah. Sedangkan yang dikategorikan sebagai tidak membeli jika rumah tangga memperoleh air minum dengan usaha sendiri tanpa harus membayar.

**Tabel 8. Persentase Rumah Tangga menurut Cara Memperoleh Air Minum dan Tipe Daerah, 2015**

Cara Memperoleh Sumber Air Minum	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Membeli eceran	24,47	14,06	18,77
Langganan	26,04	14,80	19,88
Tidak membeli	49,49	71,14	61,35
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: Diolah dari Susenas 2015

Pada tahun 2015, persentase rumah tangga di Jawa Tengah yang mendapatkan air minum dengan cara membeli, baik secara eceran maupun langganan, jauh lebih kecil dibanding tidak membeli, yaitu 38,65 persen dibanding

61,35 persen. Tabel 8. juga menunjukkan bahwa untuk daerah perkotan, persentase rumah tangga yang cara memperoleh air minum dengan cara membeli lebih besar dibandingkan daerah perdesaan, yaitu 50,51 persen dibanding 28,86 persen.

Dari seluruh rumah tangga di 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, rumah tangga di Kota Tegal adalah rumah tangga di wilayah yang paling banyak memperoleh air minum dengan cara membeli eceran 73,20 persen. Sekitar 71,11 persen rumah tangga di Kota Magelang memperoleh air minum dengan cara berlangganan. Sedangkan rumah tangga di Kabupaten Banjarnegara sekitar 92,96 persen mendapatkan air minum dengan cara tidak membeli. Secara lebih rinci dapat dilihat pada lampiran Tabel A.10.

### 4.3 Fasilitas Buang Air Besar

Selain sarana air bersih, sarana pembuangan kotoran (jamban) merupakan sarana sanitasi lain yang semestinya terdapat dalam rumah. Jamban termasuk kelompok sarana sanitasi yang ada dalam 3 komponen penilaian rumah sehat berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 829/Menkes/SK/VII/1999. Rumah tangga akan cenderung memilih tempat tinggal yang memiliki tempat buang air besar sendiri dengan alasan bahwa fasilitas milik sendiri bisa terjaga kebersihannya.

**Tabel 9. Persentase Rumah Tangga menurut Penggunaan Fasilitas Buang air Besar dan Tipe Daerah, 2015**

<b>Penggunaan Fasilitas Buang Air Besar</b>	<b>Perkotaan</b>	<b>Perdesaan</b>	<b>Perkotaan + Perdesaan</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
Sendiri	78,98	73,04	75,73
Bersama	11,76	11,66	11,71
MCK Komunal	0,21	0,41	0,31
Umum	1,42	1,49	1,46
Tidak ada	7,63	13,40	10,79
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: Diolah dari Susenas 2015

Tabel 9. memberikan informasi bahwa persentase rumah tangga di Jawa Tengah yang telah memiliki fasilitas tempat buang air besar mencapai 89,21 persen, baik fasilitas buang air besar tersebut milik sendiri (75,73 persen), bersama



(11,71 persen), MCK Komunal (0,31 persen) maupun yang digunakan secara umum (1,46 persen). Hal ini berarti masih ada sekitar 10,79 persen rumah tangga yang tidak ada fasilitas buang air besar ini kemungkinan membuang kotorannya langsung di kebun, sungai, sawah, atau tempat tertentu lainnya

Bila dilihat menurut tipe daerahnya, pada tahun 2015 persentase rumah tangga di perdesaan yang telah menggunakan fasilitas tempat buang air besar milik sendiri mencapai 73,04 persen, sementara, di perkotaan sudah mencapai 78,98 persen. Namun demikian masih ada rumah tangga di perkotaan yang menggunakan fasilitas tempat buang air besar bersama yaitu sekitar 11,76 persen, MCK Komunal sekitar 0,21 persen dan sekitar 1,42 persen menggunakan fasilitas umum, bahkan sekitar 7,63 persen tidak ada fasilitas tempat buang air besar.

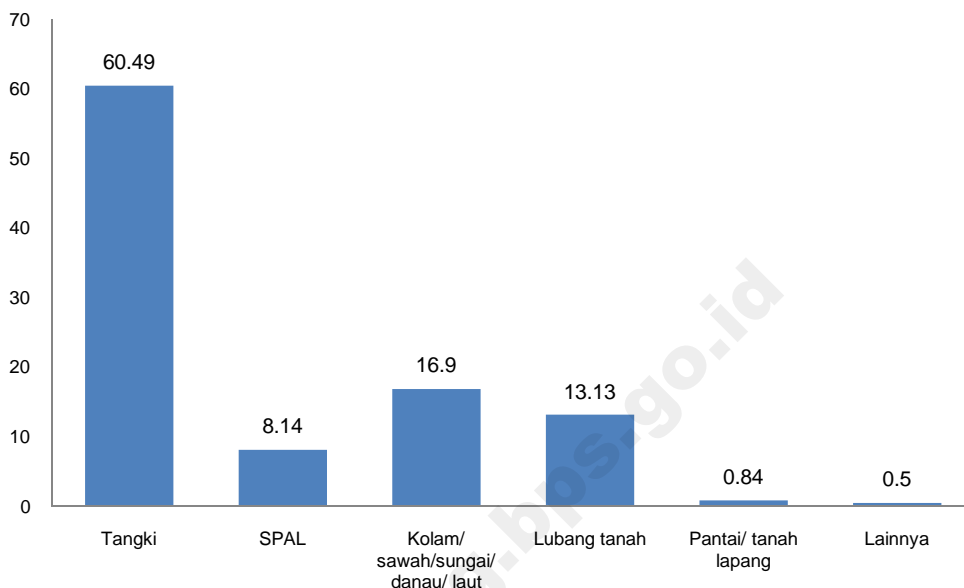
Rumah tangga yang tidak ada fasilitas buang air besar tersebar di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Dari 35 kabupaten/kota tersebut, tiga kabupaten/kota dengan persentase rumah tangga yang tidak ada fasilitas buang air besar tertinggi terdapat di Kabupaten Banjarnegara (24,50 persen), Kabupaten Banyumas (24,30 persen), dan Kabupaten Brebes (23,92 persen). Sedangkan persentase terkecil terdapat di Kota Surakarta (0,00 persen) dan Kota Salatiga (0,16 persen). Wilayah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dengan persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas buang air besar sendiri terdapat di Kabupaten Wonogiri (91,13 persen), Kabupaten Karangayar (87,92 persen) dan Kabupaten Kudus (87,25 persen) (Tabel A.11.).

Masih adanya rumah tangga yang tinggal di rumah tanpa jamban patut mendapat perhatian dari pemerintah. Hal tersebut berkaitan dengan masalah kesehatan penghuni rumah maupun lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Kotoran yang dibuang sembarangan dapat menimbulkan berbagai penyakit yang disebarkan oleh vektor penyakit seperti lalat maupun serangga lain. Di samping itu, perilaku membuang kotoran secara sembarangan juga dapat mengganggu kenyamanan penduduk di sekitarnya akibat bau yang ditimbulkannya.

Aspek yang paling penting dari fasilitas pembuangan buang air besar adalah tempat pembuangan akhir tinja. Tempat pembuangan akhir tinja yang tidak tertutup akan menimbulkan bau dan dapat menyebarkan kuman penyakit di sekitar tempat tinggal. Dari beberapa jenis tempat pembuangan akhir tinja, SPAL merupakan tempat pembuangan yang paling memenuhi standar kesehatan karena mengurangi tercemarnya sumber air minum rumah tangga dari resapan limbah tinja. Tempat pembuangan akhir tinja di tempat terbuka rentan menjadi penyebab

penyakit, khususnya jika dalam tinja terkandung kuman penyakit, seperti disentri, selain juga mengurangi estetika lingkungan.

**Gambar 8. Persentase Rumah Tangga menurut Tempat Pembuangan Akhir Tinja, 2015**



Sumber: Diolah dari Susenas 2015

Gambar 8. memperlihatkan bahwa sekitar 68,63 persen rumah tangga di Provinsi Jawa Tengah telah menggunakan tangki/SPAL sebagai tempat pembuangan akhir tinja. Namun demikian masih ada sekitar 31,37 persen dari total rumah tangga di Jawa Tengah yang tempat pembuangan akhir tinjanya masih tidak menggunakan tangki/SPAL, yaitu sekitar 16,90 persen rumah tangga pembuangan akhir tinjanya di kolam, sawah, sungai, danau atau laut; 13,13 persen di lubang tanah; 0,84 persen di pantai/tanah lapang atau kebun dan sekitar 0,50 persen rumah tangga pembuangan akhir tinja di tempat lainnya.

Dari Tabel 10. dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan kondisi tempat pembuangan akhir tinja di daerah perkotaan dengan daerah perdesaan. Meskipun tempat pembuangan akhir tinja menggunakan tangki/SPAL paling dominan di kedua tipe daerah, namun persentase di daerah perkotaan jauh lebih tinggi dibandingkan daerah perdesaan, yaitu 77,99 persen berbanding 60,88 persen. Untuk jenis pembuangan akhir lubang tanah, persentase rumah tangga di daerah perdesaan jauh lebih besar dari pada daerah perkotaan, yaitu 17,42 persen

berbanding 7,94 persen, hal ini dimungkinkan karena masih banyaknya lahan kosong di daerah perdesaan dan kurangnya pengetahuan akan kebersihan dan kesehatan.

**Tabel 10. Persentase Rumah Tangga menurut Tempat Pembuangan Akhir Tinja dan Tipe Daerah, 2015**

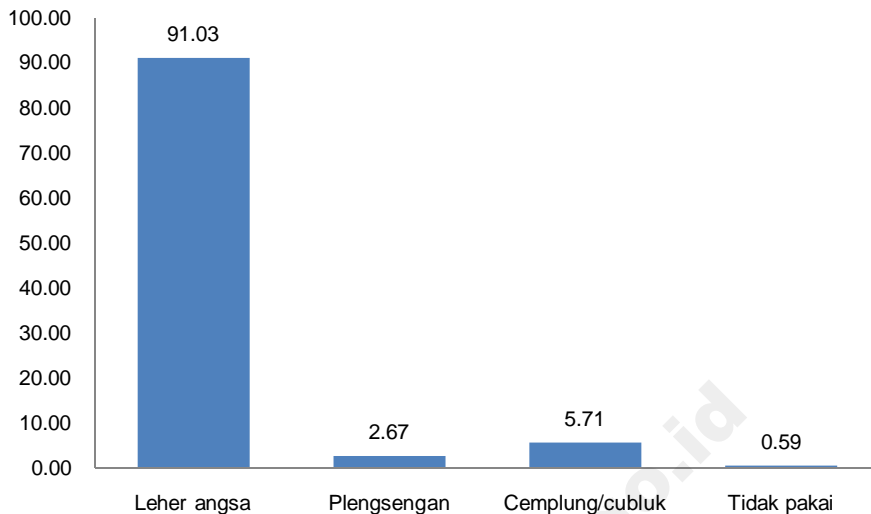
Tempat Pembuangan Akhir Tinja	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Tangki	68,15	54,15	60,49
SPAL	9,84	6,73	8,14
Kolam/sawah Sungai/danau/laut	13,16	19,98	16,90
Lubang tanah	7,94	17,42	13,13
Pantai/tanah lapang	0,53	1,11	0,84
Lainnya	0,37	0,61	0,50
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: Diolah dari Susenas 2015

Komponen penting lain dari jamban adalah kloset. Kloset adalah tempat duduk/jongkok yang digunakan di WC/kakus yang dibedakan menjadi leher angsa, plengsengan, cemplung/cubluk, dan tidak memakai kloset. Kakus leher angsa merupakan salah satu jenis jamban/kakus yang memenuhi persyaratan kesehatan, seperti diantaranya menghindari pencemaran pada sumber-sumber air minum dan permukaan tanah yang ada di sekitar jamban, menghindari atau mencegah timbulnya bau, tidak memungkinkan berkembang biaknya lalat, serta dapat diterima oleh masyarakat setempat.

Gambar 9. menunjukkan bahwa sebagian besar (91,03 persen) rumah tangga di Provinsi Jawa Tengah sudah menggunakan kloset jenis leher angsa. Dari hasil Susenas 2015 dapat diamati, ternyata masih ada rumah tangga yang menggunakan plengsengan (2,67 persen), cemplung/cubluk (5,71 persen), dan bahkan tidak pakai kloset (0,59 persen) walaupun jumlahnya jauh lebih kecil dibandingkan yang menggunakan leher angsa.

**Gambar 9. Persentase Rumah tangga menurut Jenis Kloset, 2015**



Sumber: Diolah dari Susenas 2015

Bila dilihat dari tipe daerah, persentase terbesar rumah tangga yang menggunakan kloset jenis leher angsa berada di daerah perkotaan (95,39 persen). Namun demikian, masih ada rumah tangga di daerah perkotaan yang tidak memakai kloset untuk buang air besar. Dari Tabel 11. dapat dilihat persentase rumah tangga di perkotaan yang tidak menggunakan kloset sebesar 0,25 persen, lebih kecil dibandingkan di daerah perdesaan (0,88 persen).

**Tabel 11. Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Kloset dan Tipe Daerah, 2015**

Jenis Kloset	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Leher Angsa	95,39	87,20	91,03
Plengsengan	2,01	3,23	2,47
Cemplung/Cebluk	2,34	8,69	5,71
Tidak pakai	0,25	0,88	0,59
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: Diolah dari Susenas 2015

Kabupaten/kota dengan persentase rumah tangga yang menggunakan jenis kloset leher angsa terbanyak terdapat di Kota Surakarta (99,17 persen), Kabupaten Brebes (99,08 persen) dan Kota Magelang (98,82 persen). Yang menarik untuk diamati adalah masih terdapat beberapa kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang rumah tangganya tidak memakai kloset untuk buang air besar, dengan persentase terbesar di Kabupaten Banjarnegara, tercatat sebesar 4,44 persen (Tabel A.13.).

<http://jateng.bps.go.id>

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Rumah yang nyaman dan sehat dapat diukur dari aspek kualitas dan fasilitas rumah. Untuk mendapatkan gambaran mengenai kualitas dan fasilitas rumah di Provinsi Jawa Tengah digunakan beberapa indikator yang bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2015.

Dari sisi kualitas, mayoritas rumah di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan kualitas yang cukup baik. Berdasarkan hasil Susenas 2015 beberapa indikator perumahan di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan tanda positif, seperti sebagian besar rumah sudah memiliki lantai dengan luas lebih dari 20 meter persegi, berlantai bukan dari tanah, beratap dari genteng dan ber dinding tembok.

Dari sisi fasilitas juga menunjukkan kondisi yang cukup baik. Sebagian besar rumah tangga di Provinsi Jawa Tengah telah memiliki fasilitas rumah yang memadai dan memenuhi aspek kesehatan, seperti sebagian besar sudah menggunakan listrik sebagai sumber penerangan utama, menggunakan air minum dari sumber terlindung, jarak sumber air minum ke tempat penampungan tinja yang telah memenuhi standar kesehatan (> 10 meter), dan telah memiliki fasilitas buang air besar, baik yang merupakan milik sendiri, milik bersama (dimiliki bersama oleh beberapa anggota rumah tangga), dan umum.

#### **5.2 Saran dan Rekomendasi**

Berdasarkan beberapa indikator perumahan yang telah dibahas sebelumnya, ada beberapa rekomendasi yang perlu menjadi perhatian oleh semua pihak, khususnya pemangku kebijakan di bidang pembangunan perumahan di Provinsi Jawa Tengah. Beberapa saran dan rekomendasi tersebut antara lain:

1. Melihat masih ada rumah tangga yang tinggal di rumah dengan kualitas yang kurang memadai dan belum layak, dapat menjadi landasan kuat bagi pemerintah untuk menyelenggarakan perumahan yang layak dan terjangkau, misalnya dengan mengadakan program bedah rumah, atau bahkan menyediakan perumahan murah dan sederhana yang terjangkau serta memenuhi standar hidup layak dan standar kesehatan.
2. Masih adanya rumah tangga yang belum menggunakan listrik dan belum tersedianya air bersih mungkin tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan

ekonomi, namun juga dimungkinkan karena belum tersedianya infrastruktur yang memadai. Hal tersebut patut untuk menjadi perhatian, misalnya dengan membangun jaringan listrik, serta penyediaan air bersih.

3. Disamping infrastruktur inti perumahan, yang tidak kalah penting adalah infrastruktur pendukung, seperti infrastruktur di bidang pendidikan (misalnya dengan pembangunan sekolah yang mudah diakses oleh masyarakat), bidang kesehatan, bidang ekonomi serta sosial budaya, yang perlu diintegrasikan dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan kesehatan lingkungan.

<http://jateng.bps.go.id>

## DAFTAR PUSTAKA

Republik Indonesia.2011. Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, No.7. Sekretariat Negara. Jakarta

Republik Indonesia.1999. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 829 Tahun 1999 tentang Persyaratan Kesehatan Perumahan. Sekretariat Kabinet RI.Jakarta

<http://jateng.bps.go.id>





# LAMPIRAN

<http://jateng.bps.go.id>



**Tabel A.1. Banyaknya Rumah Tangga menurut Kabupaten/Kota, 2013 - 2015**

Kabupaten/Kota	Tahun		
	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)
Kab.Cilacap	453.548	459.181	477.279
Kab.Banyumas	420.815	444.174	454.200
Kab.Purbalingga	214.256	218.215	230.644
Kab.Banjarnegara	228.690	240.126	234.711
Kab.Kebumen	307.500	328.956	322.327
Kab.Purworejo	205.808	204.372	214.836
Kab.Wonosobo	204.098	211.319	216.657
Kab.Magelang	323.646	335.729	335.715
Kab.Boyolali	264.800	269.538	275.866
Kab.Klaten	315.462	336.048	340.944
Kab.Sukoharjo	218.558	231.349	242.414
Kab.Wonogiri	256.987	269.626	280.650
Kab.Karanganyar	214.612	227.498	231.189
Kab.Sragen	240.671	252.982	254.519
Kab.Grobogan	387.906	395.399	405.750
Kab.Blora	239.720	244.126	254.816
Kab.Rembang	167.327	170.566	177.062
Kab.Pati	342.641	360.869	361.422
Kab.Kudus	205.040	206.900	217.173
Kab.Jepara	298.704	302.516	320.286
Kab.Demak	284.120	294.959	298.492
Kab.Semarang	251.812	266.584	270.664
Kab.Temanggung	190.700	193.876	195.879
Kab.Kendal	249.127	257.845	260.987
Kab.Batang	180.579	186.817	188.558
Kab.Pekalongan	200.381	203.904	203.183
Kab.Pemalang	302.487	322.119	318.266
Kab.Tegal	350.309	361.516	368.848
Kab.Brebes	445.437	460.300	469.589
Kota Magelang	31.912	33.828	34.619
Kota Surakarta	144.499	149.969	144.254
Kota Salatiga	46.965	53.544	50.590
Kota Semarang	439.022	466.678	448.404
Kota Pekalongan	70.007	72.813	75.854
Kota Tegal	64.472	65.876	71.007
Propinsi Jateng	8.762.621	9.100.122	9.247.654

Sumber: Diolah dari Susenas 2015

**Tabel A.2. Persentase Rumah Tangga menurut Kabupaten/Kota dan Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal, 2015**

Kabupaten/Kota	Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal				
	Milik sendiri	Kontrak/sewa	Bebas sewa	Lainnya	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kab.Cilacap	94,42	2,06	3,03	0,48	100,00
Kab.Banyumas	92,07	4,30	3,32	0,31	100,00
Kab.Purbalingga	95,22	1,56	2,45	0,76	100,00
Kab.Banjarnegara	96,21	1,03	2,49	0,28	100,00
Kab.Kebumen	94,04	0,54	4,57	0,84	100,00
Kab.Purworejo	90,45	1,10	8,11	0,35	100,00
Kab.Wonosobo	95,61	1,34	2,94	0,11	100,00
Kab.Magelang	92,10	1,57	5,92	0,41	100,00
Kab.Boyolali	93,90	0,69	4,88	0,53	100,00
Kab.Klaten	91,13	2,57	6,09	0,20	100,00
Kab.Sukoharjo	85,16	5,27	9,02	0,55	100,00
Kab.Wonogiri	95,90	0,53	2,99	0,58	100,00
Kab.Karanganyar	95,12	1,38	3,29	0,21	100,00
Kab.Sragen	95,67	1,08	2,53	0,72	100,00
Kab.Grobogan	96,57	0,35	2,98	0,10	100,00
Kab.Blora	95,14	0,95	3,91	0,00	100,00
Kab.Rembang	92,60	1,47	5,32	0,62	100,00
Kab.Pati	96,07	0,67	2,79	0,47	100,00
Kab.Kudus	90,83	1,99	7,05	0,13	100,00
Kab.Jepara	93,98	0,63	4,86	0,54	100,00
Kab.Demak	95,34	1,19	3,33	0,13	100,00
Kab.Semarang	93,22	3,10	3,55	0,13	100,00
Kab.Temanggung	96,44	1,46	1,75	0,35	100,00
Kab.Kendal	89,73	1,19	9,08	0,00	100,00
Kab.Batang	95,81	0,64	3,12	0,44	100,00
Kab.Pekalongan	90,82	1,19	86,67	1,31	100,00
Kab.Pemalang	94,08	1,16	4,40	0,36	100,00
Kab.Tegal	83,74	1,48	13,29	1,49	100,00
Kab.Brebes	85,51	0,91	12,97	0,61	100,00
Kota Magelang	73,31	10,57	9,64	6,48	100,00
Kota Surakarta	63,99	16,69	18,37	0,95	100,00
Kota Salatiga	81,05	11,48	6,61	0,86	100,00
Kota Semarang	74,85	10,02	12,38	2,76	100,00
Kota Pekalongan	70,54	3,02	23,97	2,47	100,00
Kota Tegal	64,85	3,83	28,65	2,67	100,00
Propinsi Jateng	90,93	2,29	6,14	0,63	100,00

Sumber: Diolah dari Susenas Maret 2015

**Tabel A.3. Persentase Rumah Tangga menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Atap Terluas Bangunan Tempat Tinggal, 2015**

Kabupaten/Kota	Jenis Atap Terluas Bangunan Tempat Tinggal					
	Beton	Genteng	Asbes	Seng	Lainnya	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	167(5)	(6)	(7)
Kab.Cilacap	0,43	81,12	13,91	4,44	0,10	100,00
Kab.Banyumas	0,26	73,15	10,07	16,45	0,06	100,00
Kab.Purbalingga	0,36	45,92	9,04	44,14	0,54	100,00
Kab.Banjarnegara	0,53	85,52	3,86	9,94	0,14	100,00
Kab.Kebumen	1,00	93,34	4,19	1,47	0,00	100,00
Kab.Purworejo	0,67	97,26	1,05	1,02	0,00	100,00
Kab.Wonosobo	1,99	48,95	6,93	42,12	0,00	100,00
Kab.Magelang	1,56	97,07	1,26	0,10	0,00	100,00
Kab.Boyolali	0,47	98,96	0,30	0,18	0,08	100,00
Kab.Klaten	1,04	98,38	0,57	0,00	0,00	100,00
Kab.Sukoharjo	3,23	95,84	0,93	0,00	0,00	100,00
Kab.Wonogiri	0,80	98,46	0,62	0,11	0,00	100,00
Kab.Karanganyar	1,53	92,03	1,19	5,25	0,00	100,00
Kab.Sragen	0,86	98,72	0,25	0,00	0,17	100,00
Kab.Grobogan	0,26	98,51	1,16	0,00	0,08	100,00
Kab.Blora	0,43	98,65	0,80	0,00	0,12	100,00
Kab.Rembang	0,56	97,92	0,92	0,14	0,45	100,00
Kab.Pati	0,73	98,52	0,35	0,29	0,11	100,00
Kab.Kudus	0,92	98,83	0,25	0,00	0,00	100,00
Kab.Jepara	0,69	98,21	0,24	0,17	0,69	100,00
Kab.Demak	1,16	95,70	3,08	0,06	0,00	100,00
Kab.Semarang	0,90	95,76	2,93	0,19	0,21	100,00
Kab.Temanggung	2,44	91,30	1,67	4,60	0,00	100,00
Kab.Kendal	0,93	93,66	4,18	1,23	0,00	100,00
Kab.Batang	0,00	86,76	1,94	11,30	0,00	100,00
Kab.Pekalongan	0,27	90,82	3,14	5,76	0,00	100,00
Kab.Pemalang	1,06	71,83	3,75	22,83	0,53	100,00
Kab.Tegal	0,10	90,86	4,19	4,85	0,00	100,00
Kab.Brebes	0,53	96,78	1,15	1,14	0,41	100,00
Kota Magelang	2,02	91,02	4,47	1,96	0,53	100,00
Kota Surakarta	4,18	90,76	4,07	0,99	0,00	100,00
Kota Salatiga	4,26	89,99	4,35	1,40	0,00	100,00
Kota Semarang	3,35	75,24	20,75	0,56	0,10	100,00
Kota Pekalongan	0,66	95,38	3,44	0,53	0,00	100,00
Kota Tegal	0,97	95,14	3,27	0,45	0,18	100,00
Propinsi Jateng	1,03	89,52	4,11	5,21	0,12	100,00

Sumber: Diolah dari Susenas 2015

**Tabel A.4. Persentase Rumah Tangga menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Dinding Terluas Bangunan Tempat Tinggal, 2015**

Kabupaten/Kota	Jenis Dinding Terluas Bangunan Tempat Tinggal				
	Tembok	Kayu	Anyaman Bambu	Lainnya	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kab.Cilacap	74,83	6,56	12,38	6,23	100,00
Kab.Banyumas	74,18	13,01	7,19	5,62	100,00
Kab.Purbalingga	81,63	6,83	8,11	3,43	100,00
Kab.Banjarnegara	77,46	16,02	4,11	2,40	100,00
Kab.Kebumen	86,25	4,60	4,61	4,53	100,00
Kab.Purworejo	81,69	4,81	8,58	4,92	100,00
Kab.Wonosobo	76,84	22,43	0,45	0,28	100,00
Kab.Magelang	83,70	9,33	5,04	1,93	100,00
Kab.Boyolali	72,70	21,17	3,91	2,22	100,00
Kab.Klaten	97,01	0,63	1,10	1,26	100,00
Kab.Sukoharjo	93,38	0,95	2,54	3,13	100,00
Kab.Wonogiri	76,91	17,39	1,99	3,71	100,00
Kab.Karanganyar	95,68	1,27	2,21	0,84	100,00
Kab.Sragen	63,69	28,59	4,35	3,37	100,00
Kab.Grobogan	15,29	80,21	3,05	1,45	100,00
Kab.Blora	20,24	75,59	0,82	3,36	100,00
Kab.Rembang	50,00	37,19	8,86	3,95	100,00
Kab.Pati	77,16	14,00	5,86	2,98	100,00
Kab.Kudus	96,78	2,09	1,13	0,00	100,00
Kab.Jepara	85,78	11,81	1,39	1,03	100,00
Kab.Demak	54,59	41,96	2,09	1,36	100,00
Kab.Semarang	73,55	24,62	0,91	0,92	100,00
Kab.Temanggung	77,70	17,76	0,44	4,09	100,00
Kab.Kendal	58,30	39,72	0,80	1,18	100,00
Kab.Batang	69,12	27,76	0,38	2,74	100,00
Kab.Pekalongan	93,54	3,32	1,80	1,34	100,00
Kab.Pemalang	82,88	10,20	4,01	2,91	100,00
Kab.Tegal	92,11	3,83	2,94	1,12	100,00
Kab.Brebes	86,05	2,70	8,25	2,99	100,00
Kota Magelang	92,29	5,22	0,17	2,32	100,00
Kota Surakarta	93,71	3,69	1,19	1,42	100,00
Kota Salatiga	89,85	9,71	0,00	0,45	100,00
Kota Semarang	92,69	4,68	0,14	2,50	100,00
Kota Pekalongan	93,85	3,70	0,90	1,54	100,00
Kota Tegal	98,27	0,36	1,08	0,29	100,00
Propinsi Jateng	76,25	17,28	3,83	2,64	100,00

Sumber: Diolah dari Susenas 2015

**Tabel A.5. Persentase Rumah Tangga menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Lantai Terluas Bangunan Tempat Tinggal, 2015**

Kabupaten/Kota	Jenis Lantai Terluas Bangunan Tempat Tinggal						Total
	Marmer/ granit/ keramik	Ubin/ Tegel/ teraso	Kayu/ Papan kualitas tinggi	Semen/ Batu Merah	Tanah	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Kab.Cilacap	52,24	13,77	0,00	20,98	12,92	0,09	100,00
Kab.Banyumas	54,00	13,46	0,11	21,24	10,78	0,40	100,00
Kab.Purbalingga	50,86	12,87	0,00	24,82	10,92	0,53	100,00
Kab.Banjarnegara	44,13	18,53	0,42	26,47	10,28	0,17	100,00
Kab.Kebumen	41,91	12,67	0,00	35,47	9,84	0,11	100,00
Kab.Purworejo	36,66	21,96	0,00	26,04	15,15	0,19	100,00
Kab.Wonosobo	38,37	12,59	0,17	35,37	12,69	0,82	100,00
Kab.Magelang	32,27	13,16	0,00	38,50	15,94	0,14	100,00
Kab.Boyolali	31,57	11,45	0,63	34,83	21,28	0,23	100,00
Kab.Klaten	43,19	12,97	0,00	38,33	5,36	0,15	100,00
Kab.Sukoharjo	52,34	13,24	0,00	30,02	4,27	0,12	100,00
Kab.Wonogiri	38,21	26,98	0,22	24,00	10,02	0,57	100,00
Kab.Karanganyar	52,50	10,18	0,00	30,14	7,08	0,10	100,00
Kab.Sragen	30,57	12,45	0,59	32,78	22,65	0,97	100,00
Kab.Grobogan	11,80	6,61	2,20	19,95	51,84	7,60	100,00
Kab.Blora	17,29	8,21	3,48	15,93	53,52	1,57	100,00
Kab.Rembang	38,42	11,11	0,17	11,89	37,71	0,69	100,00
Kab.Pati	52,47	8,01	0,00	18,66	20,62	0,25	100,00
Kab.Kudus	60,82	16,90	0,00	14,99	6,78	0,51	100,00
Kab.Jepara	53,10	7,40	0,09	22,78	16,56	0,06	100,00
Kab.Demak	32,04	9,70	2,59	31,47	17,64	6,56	100,00
Kab.Semarang	41,31	8,76	0,52	31,42	16,34	1,66	100,00
Kab.Temanggung	40,20	14,28	0,00	33,76	11,76	0,00	100,00
Kab.Kendal	43,42	15,45	0,12	16,92	23,20	0,90	100,00
Kab.Batang	54,47	12,38	0,25	12,89	19,82	0,19	100,00
Kab.Pekalongan	66,80	11,76	0,00	14,31	6,96	0,16	100,00
Kab.Pemalang	54,32	12,36	0,00	18,31	15,01	0,00	100,00
Kab.Tegal	56,17	9,78	0,29	22,84	10,72	0,20	100,00
Kab.Brebes	53,42	11,10	0,16	20,13	14,90	0,30	100,00
Kota Magelang	54,55	13,85	0,18	29,66	1,74	0,00	100,00
Kota Surakarta	59,37	16,03	0,00	22,71	1,69	0,20	100,00
Kota Salatiga	62,98	12,96	0,00	19,61	4,18	0,28	100,00
Kota Semarang	67,91	13,18	0,25	14,90	3,41	0,35	100,00
Kota Pekalongan	70,89	16,97	0,00	9,20	2,65	0,28	100,00
Kota Tegal	69,02	18,50	0,00	9,87	2,61	0,00	100,00
Propinsi Jateng	45,99	12,66	0,40	24,23	15,83	0,89	100,00

Sumber: Diolah dari Susenas 2015



**Tabel A.6. Persentase Rumah Tangga menurut Kabupaten/Kota dan Luas Lantai Per Kapita Bangunan Tempat Tinggal, 2015**

Kabupaten/Kota	Luas Lantai Per Kapita Bangunan Tempat Tinggal (m <sup>2</sup> )					
	<=5	6-7	8-9	10-12	13+	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
Kab.Cilacap	1,05	2,03	4,53	12,10	80,29	100,00
Kab.Banyumas	1,00	1,60	4,73	13,11	79,57	100,00
Kab.Purbalingga	0,78	2,38	3,42	13,42	80,00	100,00
Kab.Banjarnegara	0,86	2,41	3,72	12,67	80,34	100,00
Kab.Kebumen	1,15	1,30	2,58	10,72	84,26	100,00
Kab.Purworejo	2,06	1,40	2,77	9,40	84,37	100,00
Kab.Wonosobo	0,64	3,49	3,26	12,51	80,11	100,00
Kab.Magelang	3,04	2,37	3,86	9,49	81,25	100,00
Kab.Boyolali	0,89	1,03	2,03	4,41	91,64	100,00
Kab.Klaten	0,62	0,39	1,74	6,96	90,29	100,00
Kab.Sukoharjo	2,63	0,77	3,18	5,50	87,92	100,00
Kab.Wonogiri	0,11	0,45	0,94	3,01	95,49	100,00
Kab.Karanganyar	1,31	0,35	2,21	6,24	89,89	100,00
Kab.Sragen	1,02	0,48	1,57	3,57	93,35	100,00
Kab.Grobogan	0,41	0,49	0,70	3,00	95,40	100,00
Kab.Blora	1,16	0,11	0,81	2,65	95,27	100,00
Kab.Rembang	2,33	2,08	2,88	8,60	84,12	100,00
Kab.Pati	0,97	1,62	3,83	10,63	82,94	100,00
Kab.Kudus	1,54	1,76	6,23	9,84	80,63	100,00
Kab.Jepara	0,98	1,86	3,43	12,81	80,91	100,00
Kab.Demak	1,37	1,03	4,82	13,25	79,53	100,00
Kab.Semarang	1,73	0,99	2,06	5,31	89,89	100,00
Kab.Temanggung	0,86	1,38	2,53	8,82	86,11	100,00
Kab.Kendal	0,31	1,68	2,57	8,63	86,80	100,00
Kab.Batang	1,37	1,78	3,29	10,42	83,14	100,00
Kab.Pekalongan	2,26	2,95	3,51	13,73	77,55	100,00
Kab.Pemalang	2,13	3,62	8,04	12,99	73,22	100,00
Kab.Tegal	1,20	1,22	1,77	9,67	86,12	100,00
Kab.Brebes	1,50	3,53	4,70	13,20	77,07	100,00
Kota Magelang	4,73	3,99	5,88	11,93	73,48	100,00
Kota Surakarta	9,94	3,69	7,01	10,91	68,44	100,00
Kota Salatiga	3,47	1,89	5,27	7,77	81,60	100,00
Kota Semarang	6,12	3,45	4,85	11,08	74,50	100,00
Kota Pekalongan	4,13	3,59	4,59	9,22	78,46	100,00
Kota Tegal	4,25	3,75	4,57	8,35	79,07	100,00
Propinsi Jateng	1,70	1,79	3,41	9,46	83,64	100,00

Sumber: Diolah dari Susenas 2015

**Tabel A.7. Persentase Rumah Tangga menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Penerangan Utama Bangunan Tempat Tinggal, 2015**

Kabupaten/Kota	Sumber Penerangan Utama Bangunan Tempat Tinggal			
	Listrik PLN	Listrik Non PLN	Bukan Listrik	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kab.Cilacap	99,11	0,81	0,09	100,00
Kab.Banyumas	99,82	0,08	0,11	100,00
Kab.Purbalingga	99,28	0,20	0,52	100,00
Kab.Banjarnegara	99,61	0,13	0,27	100,00
Kab.Kebumen	99,39	0,08	0,53	100,00
Kab.Purworejo	99,53	0,33	0,13	100,00
Kab.Wonosobo	100,00	0,00	0,00	100,00
Kab.Magelang	98,97	0,90	0,13	100,00
Kab.Boyolali	99,69	0,31	0,00	100,00
Kab.Klaten	100,00	0,00	0,00	100,00
Kab.Sukoharjo	100,00	0,00	0,00	100,00
Kab.Wonogiri	99,59	0,41	0,00	100,00
Kab.Karanganyar	99,89	0,00	0,11	100,00
Kab.Sragen	99,32	0,54	0,14	100,00
Kab.Grobogan	99,73	0,17	0,10	100,00
Kab.Blora	99,89	0,11	0,00	100,00
Kab.Rembang	100,00	0,00	0,00	100,00
Kab.Pati	99,47	0,53	0,00	100,00
Kab.Kudus	100,00	0,00	0,00	100,00
Kab.Jepara	98,41	1,59	0,00	100,00
Kab.Demak	99,61	0,29	0,11	100,00
Kab.Semarang	99,55	0,18	0,27	100,00
Kab.Temanggung	100,00	0,00	0,00	100,00
Kab.Kendal	100,00	0,00	0,00	100,00
Kab.Batang	100,00	0,00	0,00	100,00
Kab.Pekalongan	98,09	1,91	0,00	100,00
Kab.Pemalang	98,96	0,90	0,14	100,00
Kab.Tegal	99,65	0,35	0,00	100,00
Kab.Brebes	98,83	1,17	0,00	100,00
Kota Magelang	100,00	0,00	0,00	100,00
Kota Surakarta	99,74	0,16	0,09	100,00
Kota Salatiga	99,83	0,17	0,00	100,00
Kota Semarang	99,82	0,18	0,00	100,00
Kota Pekalongan	99,66	0,34	0,00	100,00
Kota Tegal	99,36	0,64	0,00	100,00
Propinsi Jateng	99,51	0,40	0,08	100,00

Sumber: Diolah dari Susenas 2015

**Tabel A.8. Persentase Rumah Tangga menurut Kabupaten/Kota  
Dan Sumber Air Minum, 2015**

Kabupaten/Kota	Sumber Air Minum					
	Air kemasan bermerk	Air isi ulang	Leding meteran	Leding eceran	Sumur bor/pompa	Sumur terlindung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kab.Cilacap	5,60	8,05	12,50	0,00	15,01	42,96
Kab.Banyumas	1,96	9,68	6,23	0,00	10,87	42,62
Kab.Purbalingga	0,39	3,73	13,42	0,23	4,44	44,59
Kab.Banjarnegara	0,00	1,31	2,97	0,00	5,34	34,83
Kab.Kebumen	4,47	5,97	3,59	0,00	7,39	60,77
Kab.Purworejo	1,75	1,43	7,72	0,00	17,42	45,50
Kab.Wonosobo	0,00	0,96	32,99	0,00	0,00	3,80
Kab.Magelang	0,50	0,44	16,15	0,10	6,46	30,97
Kab.Boyolali	3,60	3,33	13,47	0,31	15,09	41,61
Kab.Klaten	5,93	2,48	9,46	0,00	28,37	45,89
Kab.Sukoharjo	15,61	7,77	7,86	1,01	28,92	31,38
Kab.Wonogiri	3,26	0,94	10,37	0,97	21,49	20,04
Kab.Karanganyar	5,00	7,55	16,40	0,35	18,03	28,97
Kab.Sragen	9,69	13,06	14,27	0,46	23,68	27,74
Kab.Grobogan	5,51	34,56	7,31	0,00	13,44	13,31
Kab.Blora	7,76	20,22	5,30	0,00	25,32	31,68
Kab.Rembang	12,06	27,27	5,82	0,97	28,52	13,61
Kab.Pati	9,59	25,35	6,72	7,32	22,08	19,39
Kab.Kudus	8,85	15,37	13,88	1,05	21,29	31,99
Kab.Jepara	7,37	8,35	6,48	0,00	18,48	36,35
Kab.Demak	5,50	38,64	9,43	4,05	31,06	7,93
Kab.Semarang	2,69	3,72	11,91	0,19	15,36	33,28
Kab.Temanggung	0,80	1,38	20,30	0,00	8,67	23,29
Kab.Kendal	3,62	13,88	20,26	3,81	14,96	19,19
Kab.Batang	0,18	1,11	13,89	0,07	13,78	39,04
Kab.Pekalongan	4,84	5,22	8,38	0,87	22,74	40,50
Kab.Pemalang	1,57	7,62	13,70	2,51	33,45	21,78
Kab.Tegal	1,30	6,18	7,67	13,61	20,46	39,71
Kab.Brebes	2,01	13,95	2,77	16,71	19,89	32,15
Kota Magelang	6,02	6,02	68,60	0,31	11,91	4,63
Kota Surakarta	18,95	15,50	20,95	5,14	28,18	9,60
Kota Salatiga	11,06	4,56	55,54	0,22	7,91	18,93
Kota Semarang	18,62	32,23	19,19	3,00	17,15	8,22
Kota Pekalongan	2,32	5,83	49,96	3,04	13,73	23,73
Kota Tegal	2,36	3,69	20,68	67,96	4,46	0,85
Propinsi Jateng	5,37	11,56	11,92	2,92	17,62	29,82

Sumber: Diolah dari Susenas 2015

Lanjutan Tabel A.8

Kabupaten/Kota	Sumber Air Minum						
	Sumur tak terlindung	Mata air terlindung	Mata air tak terlindung	Air Permukaan	Air Hujan	Lainnya	Total
(1)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Kab.Cilacap	3,83	7,32	2,15	0,28	2,30	0,00	100,00
Kab.Banyumas	3,27	14,45	9,34	1,57	0,00	0,00	100,00
Kab.Purbalingga	8,38	14,61	7,64	1,74	0,74	0,08	100,00
Kab.Banjarnegara	2,46	37,25	15,15	0,69	0,00	0,00	100,00
Kab.Kebumen	2,78	9,90	4,28	0,75	0,11	0,00	100,00
Kab.Purworejo	3,09	11,36	10,57	1,16	0,00	0,00	100,00
Kab.Wonosobo	0,99	51,04	10,22	0,00	0,00	0,00	100,00
Kab.Magelang	4,36	36,97	4,06	0,00	0,00	0,00	100,00
Kab.Boyolali	8,11	7,17	4,94	0,26	2,12	0,00	100,00
Kab.Klaten	3,16	0,25	0,11	0,00	4,35	0,00	100,00
Kab.Sukoharjo	1,13	5,86	0,18	0,00	0,00	0,27	100,00
Kab.Wonogiri	1,86	31,14	5,12	0,27	4,54	0,00	100,00
Kab.Karanganyar	1,98	21,15	0,45	0,00	0,00	0,11	100,00
Kab.Sragen	2,97	7,47	0,56	0,00	0,00	0,10	100,00
Kab.Grobogan	19,62	3,98	0,86	1,20	0,09	0,12	100,00
Kab.Blora	3,32	3,62	0,95	1,82	0,00	0,00	100,00
Kab.Rembang	1,07	10,57	0,00	0,00	0,00	0,09	100,00
Kab.Pati	1,88	6,97	0,27	0,00	0,44	0,00	100,00
Kab.Kudus	2,48	2,75	1,60	0,20	0,00	0,54	100,00
Kab.Jepara	15,04	7,29	0,55	0,00	0,00	0,09	100,00
Kab.Demak	0,25	0,00	0,00	1,88	1,26	0,00	100,00
Kab.Semarang	4,21	27,85	0,78	0,00	0,00	0,00	100,00
Kab.Temanggung	1,74	40,91	2,72	0,00	0,00	0,18	100,00
Kab.Kendal	0,63	19,16	4,35	0,14	0,00	0,00	100,00
Kab.Batang	2,36	25,60	3,59	0,11	0,00	0,27	100,00
Kab.Pekalongan	1,96	12,06	3,44	0,00	0,00	0,00	100,00
Kab.Pemalang	2,06	9,80	5,41	0,56	1,30	0,25	100,00
Kab.Tegal	1,58	6,73	2,77	0,00	0,00	0,00	100,00
Kab.Brebes	2,75	9,70	0,32	0,21	0,08	0,00	100,00
Kota Magelang	0,00	2,51	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Kota Surakarta	0,74	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Kota Salatiga	0,37	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Kota Semarang	0,03	1,37	0,19	0,00	0,00	0,00	100,00
Kota Pekalongan	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	100,00
Kota Tegal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Propinsi Jateng	3,76	12,87	3,07	0,43	0,61	0,06	100,00

Sumber: Diolah dari Susenas 2015

**Tabel A.9. Persentase Rumah Tangga menurut Kabupaten/Kota dan Jarak Sumber Air ke Tempat Penampungan Kotoran/Tinja, 2015**

Kabupaten/Kota	Jarak ke Tempat Penampungan Kotoran/Tinja			
	<10 m	>= 10 m	Tidak tahu	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kab.Cilacap	22,09	71,69	6,22	100,00
Kab.Banyumas	18,44	64,55	17,01	100,00
Kab.Purbalingga	13,93	76,60	9,46	100,00
Kab.Banjarnegara	16,61	72,04	11,35	100,00
Kab.Kebumen	25,95	67,19	6,86	100,00
Kab.Purworejo	22,03	75,63	2,34	100,00
Kab.Wonosobo	2,62	97,00	0,38	100,00
Kab.Magelang	16,24	72,66	11,09	100,00
Kab.Boyolali	15,87	73,84	10,29	100,00
Kab.Klaten	27,74	66,86	5,39	100,00
Kab.Sukoharjo	24,26	68,66	7,08	100,00
Kab.Wonogiri	13,92	61,36	24,71	100,00
Kab.Karanganyar	21,94	71,06	7,00	100,00
Kab.Sragen	17,64	68,42	13,94	100,00
Kab.Grobogan	16,59	77,29	6,12	100,00
Kab.Blora	18,70	78,77	2,53	100,00
Kab.Rembang	6,57	61,88	31,55	100,00
Kab.Pati	26,93	59,36	13,71	100,00
Kab.Kudus	36,34	61,25	2,41	100,00
Kab.Jepara	19,23	76,60	4,17	100,00
Kab.Demak	7,65	44,72	47,63	100,00
Kab.Semarang	9,37	87,56	3,07	100,00
Kab.Temanggung	10,15	83,08	6,77	100,00
Kab.Kendal	20,13	68,47	11,40	100,00
Kab.Batang	22,58	65,28	12,14	100,00
Kab.Pekalongan	18,71	69,17	12,12	100,00
Kab.Pemalang	30,07	58,34	11,59	100,00
Kab.Tegal	28,17	62,53	9,30	100,00
Kab.Brebes	34,94	47,42	17,65	100,00
Kota Magelang	31,20	68,09	0,71	100,00
Kota Surakarta	33,26	59,66	7,09	100,00
Kota Salatiga	39,25	51,39	9,36	100,00
Kota Semarang	12,73	83,03	4,24	100,00
Kota Pekalongan	41,98	54,01	4,01	100,00
Kota Tegal	27,52	68,54	3,94	100,00
Propinsi Jateng	20,49	69,05	10,45	100,00

Sumber: Diolah dari Susenas 2015

**Tabel A.10. Persentase Rumah Tangga menurut Kabupaten/Kota Dan Cara Memperoleh Air Minum, 2015**

Kabupaten/Kota	Cara memperoleh Air Minum			
	Membeli Eceran	Langganan	Tidak Membeli	Total
(1)	(2)		(3)	(4)
Kab.Cilacap	13,21	14,61	72,18	100,00
Kab.Banyumas	9,20	12,84	77,96	100,00
Kab.Purbalingga	2,97	18,80	78,24	100,00
Kab.Banjarnegara	1,61	5,42	92,96	100,00
Kab.Kebumen	10,68	5,50	83,82	100,00
Kab.Purworejo	2,44	10,70	86,86	100,00
Kab.Wonosobo	0,96	36,42	62,63	100,00
Kab.Magelang	1,19	17,68	81,13	100,00
Kab.Boyolali	7,14	22,90	69,96	100,00
Kab.Klaten	8,51	12,54	78,95	100,00
Kab.Sukoharjo	27,39	15,89	56,72	100,00
Kab.Wonogiri	4,64	18,21	77,15	100,00
Kab.Karanganyar	10,28	31,35	58,37	100,00
Kab.Sragen	24,21	22,47	53,31	100,00
Kab.Grobogan	37,11	15,63	47,26	100,00
Kab.Blora	21,29	16,21	62,50	100,00
Kab.Rembang	51,41	15,33	33,26	100,00
Kab.Pati	38,51	14,23	47,27	100,00
Kab.Kudus	18,97	25,18	55,85	100,00
Kab.Jepara	16,53	10,49	72,99	100,00
Kab.Demak	46,53	36,63	16,84	100,00
Kab.Semarang	6,98	20,78	72,24	100,00
Kab.Temanggung	1,62	27,02	71,37	100,00
Kab.Kendal	21,67	31,63	46,70	100,00
Kab.Batang	1,56	18,15	80,29	100,00
Kab.Pekalongan	9,72	11,56	78,72	100,00
Kab.Pemalang	13,20	25,40	61,39	100,00
Kab.Tegal	19,97	12,54	67,48	100,00
Kab.Brebes	31,75	7,51	60,74	100,00
Kota Magelang	10,96	71,11	17,94	100,00
Kota Surakarta	34,98	26,26	38,76	100,00
Kota Salatiga	15,76	58,68	25,56	100,00
Kota Semarang	46,08	45,72	8,20	100,00
Kota Pekalongan	7,97	58,45	33,58	100,00
Kota Tegal	73,20	22,94	3,86	100,00
Propinsi Jateng	18,77	19,88	61,35	100,00

Sumber: Diolah dari Susenas 2015

**Tabel A.11. Persentase Rumah Tangga menurut Kabupaten/Kota dan Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar, 2015**

Kabupaten/Kota	Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar					
	Sendiri	Bersama	MCK Komunal	Umum	Tidak Ada	Total
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
Kab.Cilacap	76,20	8,74	0,00	0,54	14,51	100,00
Kab.Banyumas	64,79	10,26	0,09	0,56	24,30	100,00
Kab.Purbalingga	69,05	9,09	0,18	0,45	21,22	100,00
Kab.Banjarnegara	63,54	8,63	0,43	2,89	24,50	100,00
Kab.Kebumen	79,10	8,19	0,12	0,73	11,87	100,00
Kab.Purworejo	74,69	12,84	0,00	1,26	11,21	100,00
Kab.Wonosobo	75,04	12,64	0,00	9,20	3,12	100,00
Kab.Magelang	72,68	10,27	1,13	3,74	12,18	100,00
Kab.Boyolali	72,49	20,02	0,00	0,56	6,92	100,00
Kab.Klaten	76,65	16,42	0,00	0,69	6,25	100,00
Kab.Sukoharjo	77,23	17,77	0,00	0,96	4,03	100,00
Kab.Wonogiri	91,13	7,38	0,00	0,00	1,50	100,00
Kab.Karanganyar	87,92	9,55	0,00	0,00	2,53	100,00
Kab.Sragen	73,70	22,83	0,00	0,38	3,08	100,00
Kab.Grobogan	79,68	13,37	0,08	0,24	6,63	100,00
Kab.Blora	73,41	15,11	0,00	0,40	11,08	100,00
Kab.Rembang	75,58	10,91	0,13	0,39	12,99	100,00
Kab.Pati	83,97	9,40	0,15	0,21	6,28	100,00
Kab.Kudus	87,25	8,58	0,10	0,16	3,90	100,00
Kab.Jepara	74,63	20,28	0,00	0,62	4,47	100,00
Kab.Demak	80,38	10,24	0,00	1,14	8,25	100,00
Kab.Semarang	81,18	11,60	0,73	1,46	5,02	100,00
Kab.Temanggung	81,61	5,86	0,00	5,85	6,68	100,00
Kab.Kendal	77,07	66,58	0,15	0,84	15,37	100,00
Kab.Batang	76,08	5,57	0,00	2,86	15,49	100,00
Kab.Pekalongan	69,90	9,37	0,23	1,31	19,20	100,00
Kab.Pemalang	69,23	4,72	2,15	1,11	22,79	100,00
Kab.Tegal	74,86	9,63	0,24	0,37	14,90	100,00
Kab.Brebes	58,81	14,10	1,54	1,63	23,92	100,00
Kota Magelang	86,92	6,25	0,20	3,60	3,03	100,00
Kota Surakarta	72,97	17,36	2,57	7,10	0,00	100,00
Kota Salatiga	86,19	11,21	0,12	2,32	0,16	100,00
Kota Semarang	84,89	11,58	0,07	2,77	0,69	100,00
Kota Pekalongan	70,93	18,87	0,20	5,66	4,34	100,00
Kota Tegal	71,90	23,07	0,00	0,62	4,41	100,00
Propinsi Jateng	75,73	11,71	0,32	1,46	10,79	100,00

Sumber: Diolah dari Susenas 2015

**Tabel A.12. Persentase Rumah Tangga menurut Kabupaten/Kota dan Tempat Pembuangan Akhir Tinja, 2015**

Kabupaten/Kota	Tempat Pembuangan Akhir Tinja						Total
	Tangki	SPAL	Kolam/ Sawah/ Sungai/ Danau/ Laut	Lubang tanah	Pantai/ tanah lapang/ kebun	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Kab.Cilacap	64,68	3,49	23,07	8,36	0,10	0,30	100,00
Kab.Banyumas	50,76	7,63	34,83	6,17	0,36	0,26	100,00
Kab.Purbalingga	46,97	7,14	32,78	12,28	0,35	0,48	100,00
Kab.Banjarnegara	23,03	1,23	51,28	23,64	0,20	0,63	100,00
Kab.Kebumen	65,58	10,89	11,55	8,24	2,67	1,08	100,00
Kab.Purworejo	71,55	1,44	20,13	5,88	0,77	0,22	100,00
Kab.Wonosobo	26,85	1,41	57,07	14,40	0,26	0,00	100,00
Kab.Magelang	46,55	7,93	21,08	23,76	0,23	0,46	100,00
Kab.Boyolali	62,49	14,04	7,40	14,99	0,57	0,52	100,00
Kab.Klaten	74,73	12,03	8,29	4,36	0,32	0,27	100,00
Kab.Sukoharjo	84,14	9,38	5,65	0,83	0,00	0,00	100,00
Kab.Wonogiri	63,55	2,76	0,41	32,06	0,68	0,53	100,00
Kab.Karanganyar	82,85	4,11	3,59	8,85	0,13	0,47	100,00
Kab.Sragen	70,18	8,00	4,09	15,95	0,18	1,61	100,00
Kab.Grobogan	68,00	9,37	4,73	16,59	1,02	0,29	100,00
Kab.Blora	56,88	11,99	8,22	19,24	2,72	0,95	100,00
Kab.Rembang	69,10	9,72	7,29	6,68	6,42	0,79	100,00
Kab.Pati	74,00	6,28	6,02	12,38	0,78	0,54	100,00
Kab.Kudus	82,84	5,03	8,26	3,54	0,34	0,00	100,00
Kab.Jepara	44,66	7,91	4,10	41,93	1,16	0,24	100,00
Kab.Demak	83,32	2,45	9,35	3,43	1,19	0,25	100,00
Kab.Semarang	75,92	2,01	6,24	13,65	1,31	0,87	100,00
Kab.Temanggung	24,55	4,79	26,95	42,44	0,49	0,79	100,00
Kab.Kendal	47,93	13,45	18,97	18,70	0,38	0,57	100,00
Kab.Batang	38,72	13,58	27,46	18,42	0,62	1,20	100,00
Kab.Pekalongan	45,07	8,41	28,90	15,73	1,19	0,70	100,00
Kab.Pemalang	55,46	9,77	26,34	7,34	0,96	0,12	100,00
Kab.Tegal	53,25	6,62	25,41	13,29	0,89	0,54	100,00
Kab.Brebes	54,73	7,89	31,98	2,72	1,67	1,01	100,00
Kota Magelang	65,30	20,13	13,39	0,38	0,23	0,58	100,00
Kota Surakarta	71,42	20,20	5,45	2,76	0,00	0,18	100,00
Kota Salatiga	89,55	2,30	3,41	4,75	0,00	0,00	100,00
Kota Semarang	66,43	17,64	4,95	10,77	0,11	0,10	100,00
Kota Pekalongan	63,39	23,66	8,64	2,44	0,94	0,93	100,00
Kota Tegal	85,02	3,75	10,01	0,46	0,14	0,63	100,00
Propinsi Jateng	60,49	8,14	16,90	13,13	0,85	0,50	100,00

Sumber: Diolah dari Susenas 2015



**Tabel A.13. Persentase Rumah Tangga menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kloset, 2015**

Kabupaten/Kota	Jenis Kloset					Tidak Menggunakan Fasilitas BAB
	Leher Angsa	Plengse ngan	Cemplung/ Cubluk	Tidak Pakai	Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kab.Cilacap	87,09	1,81	10,38	0,72	100,00	14,51
Kab.Banyumas	94,90	1,30	2,77	1,02	100,00	24,30
Kab.Purbalingga	90,09	3,46	5,77	0,69	100,00	21,22
Kab.Banjarnegara	80,39	6,32	8,85	4,44	100,00	24,50
Kab.Kebumen	93,55	0,75	5,13	0,57	100,00	11,87
Kab.Purworejo	90,88	3,05	4,82	1,25	100,00	11,21
Kab.Wonosobo	57,77	18,62	19,35	4,25	100,00	3,12
Kab.Magelang	95,62	1,88	1,99	0,52	100,00	12,18
Kab.Boyolali	92,15	2,83	4,90	0,13	100,00	6,92
Kab.Klaten	97,82	1,27	0,58	0,33	100,00	6,25
Kab.Sukoharjo	97,70	2,16	0,14	0,00	100,00	4,03
Kab.Wonogiri	89,43	2,15	8,43	0,00	100,00	1,50
Kab.Karanganyar	98,52	0,66	0,82	0,00	100,00	2,53
Kab.Sragen	85,43	1,48	13,09	0,00	100,00	3,08
Kab.Grobogan	83,60	1,22	14,57	0,60	100,00	6,63
Kab.Blora	79,87	0,85	19,16	0,12	100,00	11,08
Kab.Rembang	92,91	1,40	5,39	0,30	100,00	12,99
Kab.Pati	92,98	1,57	5,45	0,00	100,00	6,28
Kab.Kudus	96,02	3,40	0,44	0,14	100,00	3,90
Kab.Jepara	76,11	1,74	21,64	0,51	100,00	4,47
Kab.Demak	97,56	0,67	1,76	0,00	100,00	8,25
Kab.Semarang	95,06	2,38	2,39	0,17	100,00	5,02
Kab.Temanggung	89,74	6,30	2,78	1,17	100,00	6,68
Kab.Kendal	90,96	4,14	4,57	0,33	100,00	15,37
Kab.Batang	94,74	1,34	2,99	0,93	100,00	15,49
Kab.Pekalongan	91,46	5,22	2,80	0,52	100,00	19,20
Kab.Pemalang	92,06	3,59	3,07	1,28	100,00	22,79
Kab.Tegal	91,72	5,56	2,27	0,45	100,00	14,90
Kab.Brebes	99,08	0,45	0,00	0,48	100,00	23,92
Kota Magelang	98,82	0,26	0,61	0,32	100,00	3,03
Kota Surakarta	99,17	0,47	0,36	0,00	100,00	0,00
Kota Salatiga	98,57	1,43	0,00	0,00	100,00	0,16
Kota Semarang	95,66	2,74	1,60	0,00	100,00	0,69
Kota Pekalongan	97,05	2,59	0,36	0,00	100,00	4,34
Kota Tegal	97,71	1,79	0,00	0,50	100,00	4,41
Propinsi Jateng	91,03	2,66	5,71	0,59	100,00	10,79

Sumber: Diolah dari Susenas 2015

# DATA

## MENCERDASKAN BANGSA

— *Enlighten The Nation* —

<http://jateng.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI JAWA TENGAH**  
Jl. Pahlawan No. 6 Semarang 50241  
Telp. (024) 8412802 – 8412804, Fax. (024) 8311195  
Homepage : <http://jateng.bps.go.id>, E-mail :  
[bps3300@bps.go.id](mailto:bps3300@bps.go.id)

ISSN 2407-3431

